

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspinall, Edward, et. al. 2000. *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
- Bachtiar, Harsya. W. 1988. *Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)*. Jakarta: Djambatan.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1998. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Sukriansyah. S dan Tomi Lebang. 1998. *Amuk Makassar*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Razak, Amran. 2015. *Demonstran Dari Lorong Kambing*. Jakarta: Kakilangit Kencana.
- Razak, Amran. 2018. *98-99: Catatan Kemahasiswaan Seorang Pembantu Rektor*. Yogyakarta: Pustaka Pranala.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Salam, Moch. Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samego, Indria, et. al. 1998. "... *Bila ABRI Menghendaki*". Cet ke-2. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sikati, Rasmi Ridjang. 2005. *AMARAH: Refleksi April Makassar Berdarah 1996*. Yogyakarta: Ombak.
- Sikati, Rasmi Ridjang. 2007. *Mencari Jejak AMARAH*. Makassar: Link Pena.

- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soebijono, et.al. 1992. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulistyo, Hermawan, et. al. 2000. *Kekerasan Politik Dalam Pemilu 1999: Laporan Dari Lima Daerah*. Jakarta: KIPP Indonesia.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak (Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia)*. Bandung: Mizan.
- Wibisana, Teddy, et. al. 2022. *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal

- Perdana, Hendra Aldi. 2021. "Gejolak Politik Saat Pelaksanaan Pemilu 1997 Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru." *Jurnal Historiography* (<http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/22618>).
- Pratikno. 1998. "Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 2n No. 2, (<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11152>).
- Rosyada, Nuresa Febriasti, et. al. 2022. "Pembredelan Majalah Tempo Pada Masa Orde Baru." *Jurnal Prabayaksa: Journal of History Education* (<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/pby/article/view/4675/3502>).
- Sukmana, Oman. 1998. "Reformasi dan Agenda Politik Indonesia." *Portal Bestari* (<https://www.neliti.com/id/publications/242599/reformasi-dan-agenda-politik-indonesia>).

Internet

Nu Online. 2016. "Sejarah Lahirnya PMII" (online). (<https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-lahirnya-pmii-q8TLb>. Diakses 22 Agustus 2023).

Arsip

Arsip BINTALJARAHDAM XIV/Hasanuddin. *Program Kerja dan Anggaran Kodam VII/Wirabuana Tahun Anggaran 1997/1998* (Bidang Operasi). Surat Keputusan Pangdam VII/Wrb No. SKEP/62/IV/1997

Surat Kabar

Fajar, Minggu 24 Mei 1997. "Aksi Unjukrasa Awali Minggu Tenang."

Fajar, Sabtu 21 Maret 1998. "Jadi Menteri agar Bisa Melamar Desy", Amien Rais beberkan tontonan politik dalam rapat akbar Unhas."

Fajar, Kamis, 4 Juni 1998. "Pangdam Berdialog Mahasiswa di DPRD."

Fajar, Selasa, 9 Juni 1998. "Aksi SOLID Unhas Bertemu Tim Pengkaji dan Revisi RUU Politik."

Fajar, Sabtu, 14 November 1998. "Mahasiswa Duduki Bandara Hasanuddin."

Fajar, Jumat, 29 Oktober 1999. "Unjukrasa Akbar, Makassar Macet Total."

Fajar, Selasa 13 Agustus 1996. "AMPD Akhirnya Dilarang."

Fajar, Jumat 9 Agustus 1996. "PRD Pernah Ajak AMPD Bergabung."

Identitas Unhas (Maret 1998), edisi Jumat, 27 Maret 1998. No. 464, tahun XXIII "Mahasiswa Unhas Bersatulah."

Identitas Unhas (April 1998), edisi Senin, 13 April 1998. No. 465, tahun XXIII. "Aksi Solidaritas Atas Hilangnya Sejumlah Aktivis Mahasiswa."

Identitas Unhas (Mei 1998), edisi Sabtu, 30 Mei 1998. No. 468, tahun XXIII.

“Rona Lain Demonstrasi.”

Identitas Unhas (Mei 1998), edisi Kamis, 14 Mei 1998. No. 467, tahun XXIII.

“Selamat Datang Orde Reformasi.”

Jawa Pos, Kamis 25 April 1996. “Ujung Pandang Makin Tegang Demo Mahasiswa Lebih Marak.”

Jawa Pos, Rabu 24 April 1996. “Ujung Pandang Digoyang Demonstrasi Mahasiswa UMI.”

Jawa Pos, Jumat 26 April 1996. “Lompat Sungai Karena Dikejar-kejar Petugas.”

Kompas, Kamis, 7 Mei 1998. “Agum Gumelar: Bukan Masanya Pendekatan Kekerasan.”

Kompas, Minggu 13 Maret 1994. “Saya tidak Berambisi Jadi Presiden Seumur Hidup, Kenapa Ribut-ribut.”

Kompas, Rabu, 31 Desember 1997. “Suksesi: Kontroversi dan Urgensi.”

Kompas, Jumat, 8 Mei 1998. “Aksi Mahasiswa Meluas, Korban Terus Berjatuhan.”

Kompas, Selasa, 19 Mei 1998. “Mayjen TNI Suaidi Marasabessy Pangdam Wirabuana.”

Pedoman Rakyat, Minggu, 7 Agustus 1994. “Korban Kebakaran Menangis di Gedung DPRD KMUP *FDTS Sampaikan Memorandum.”

Pedoman Rakyat, Rabu, 28 Desember 1994. “Terbentuk Aliansi Mahasiswa Prodemokrasi di UP.”

Pedoman Rakyat, Senin, 19 Agustus 1996. “Pagi Ini, Agum Gantikan Sulatin.”

Pedoman Rakyat, Sabtu 31 Desember 1994. “Pernyataan Awal Tahun Dema-AMPD UP: Pembredelan Pers Supaya Tidak Terulang Lagi.”

Pedoman Rakyat, Rabu 7 Mei 1997. “Pangdam: Selama Kampanye, ‘Rapor’ Ketiga OPP Merah.”

Pedoman Rakyat, Jumat 2 Mei 1997. “Listrik Padam, Massa PPP Amuk Kantor PLN.”

Pedoman Rakyat, Selasa 16 September 1997. “Pemuda Sakit Jiwa Tebas Dua Korbannya.”

Pedoman Rakyat, Jumat 19 September 1997. “Rp 17 Milyar, Kerugian Material Kerusuhan UP.”

Pedoman Rakyat, Kamis 18 September 1997. “ABRI Sudah Memperlihatkan Sikap Profesional.”

Pedoman Rakyat, Kamis 2 Oktober 1997. “Ekonomi Ujung Pandang Belum Stabil.”

Pedoman Rakyat, Kamis 8 Januari 1998. “Pangdam VII/Wrb: Waspada Isu yang Berkembang di Masyarakat.”

Pedoman Rakyat, Selasa 10 Februari 1998. “Harga Sembako Melambung, Pembelian Dibatasi.”

Pedoman Rakyat, Rabu 18 Februari 1998. “Mahasiswa Desak Pemda Tutup Alfa.”

Pedoman Rakyat, Rabu 18 Februari 1998. “AMPD Sampaikan Sembilan Tuntutan ke DPRD.”

Pedoman Rakyat, Kamis 5 Maret 1998. “Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan.”

Pedoman Rakyat, Kamis 12 Maret 1998. “DPRD Diblokade Panser, Kampus ‘Dikepung’ Petugas.”

Pedoman Rakyat, Sabtu 14 Maret 1998. “Agum Gumelar: Saya Siap untuk Berdialog.”

Pedoman Rakyat, Selasa 14 April 1998. “Tiga Guru Besar Unhas Ikut Aksi Mimbar Bebas.”

Pedoman Rakyat, Senin 13 April 1998. “Aktivis Mahasiswa Unhas Hilang.”

Pedoman Rakyat, Sabtu 18 April 1998. “Mahasiswa Unhas Bersatu, Desak Turun ke Jalan.”

Pedoman Rakyat, Sabtu 25 April 1998. “Pangdam VII/Wrb Mayjen. TNI. Agum Gumelar: ABRI Menghormati Aspirasi yang Berkembang di Masyarakat.”

Pedoman Rakyat, Senin 1 Juni 1998. “Wartawan Tuntut Palaguna Minta Maaf.”

Pedoman Rakyat, Senin 1 Juni 1998. “Terbukti Salahi Syarat, Palaguna Mundur Saja.”

INDEKS

A

A.Wahyudin Djalil 26
Abdul Haris Nasution 30
Abdul Malik B. Masry 34
ABRI 3, 6, 8, 12, 30, 56, 66
Adnan Buyung Nasution 40
Akbar Endra 37, 39, 46
Ali Sadikin 40
AMARAH 1, 34, 74
Amien Rais 57
A.M. Irwan Pattawari 15
AMPD 2, 26, 37, 38, 46, 49, 53
Angkatan Darat 2
Anni Mujahidah Rasunnah 44

B

Bakorstanasda 38, 40
Bandara Mandai 75

C

Cakrawala Ide 18
Catatan Kaki 18

D

Demokrasi 27
DPRD Sulsel 53, 61, 73

F

Fakultas Hukum Unhas 26
Fakultas Sastra Unhas 15, 25
Fakultas Teknik Unhas 16
FDT 25, 27
FDTS 25

Fosis 18
FPIP 34

G

Goglo 42
Golkar 42, 43

H

HMI 19, 23, 45, 48

I

IAIN Alauddin 27, 45

IKIP Ujung Pandang 13, 54, 76

Isradi Zainal 27, 29

K

Kawasan Timur Indonesia 12, 64

Kelompok Diskusi 24, 27

KKN 1, 41, 72, 73

Kodam VII/Wirabuana 2, 4, 31, 41,
67, 68, 73

Krisis Ekonomi 50, 53

M

Maperwa 14, 27

Maqbul Halim 61

Mayjen. TNI. Agum Gumelar 42, 43,
51, 66, 68

Mayjen. TNI. Suaidi Marasabessy
68, 73

Mayjen. TNI. Sulatin 31, 37, 38

Militer vii, 2, 3, 6, 30, 38, 46

Mitsubishi Pajero 74

Muh. Abduh Bakry Pabe 22

N

NKK/BKK 16

NU 20

Nurdin Halid 20

O

Orde Baru 2, 30, 32, 48, 71

Organisasi Mahasiswa 13, 19

P

PAMMI 65, 72

PDI 38

Pemilu 41

Pers Mahasiswa vii, 17, 18

PKM Unhas 63

PMII 20

PPP 43

PRD 22, 38

Prof. Dr. H. A. Muis 60

Prof. Drs. Burhamzah 60

Prof. Mattulada 60

Puskud Hasanuddin 19

R

Ramsis Unhas 61

Reformasi vii, 1, 4, 7, 49, 63, 66, 71,
73

S

Salahuddin Alam 15

Senat 13, 14, 16, 64

SMID 22

SMM 22

SMPT 14, 15

SMUH 15

Soeharto 55, 57, 70, 71

SOLID Unhas 64, 65, 69, 74

Sulawesi Merdeka 77

T

Thamrin Halide 15

U

Ujung Pandang 1, 4, 12, 44, 50

UMI 1, 18, 34, 43, 67

Universitas Hasanuddin 14, 17, 58,
60, 62, 69, 74

UPPM 18

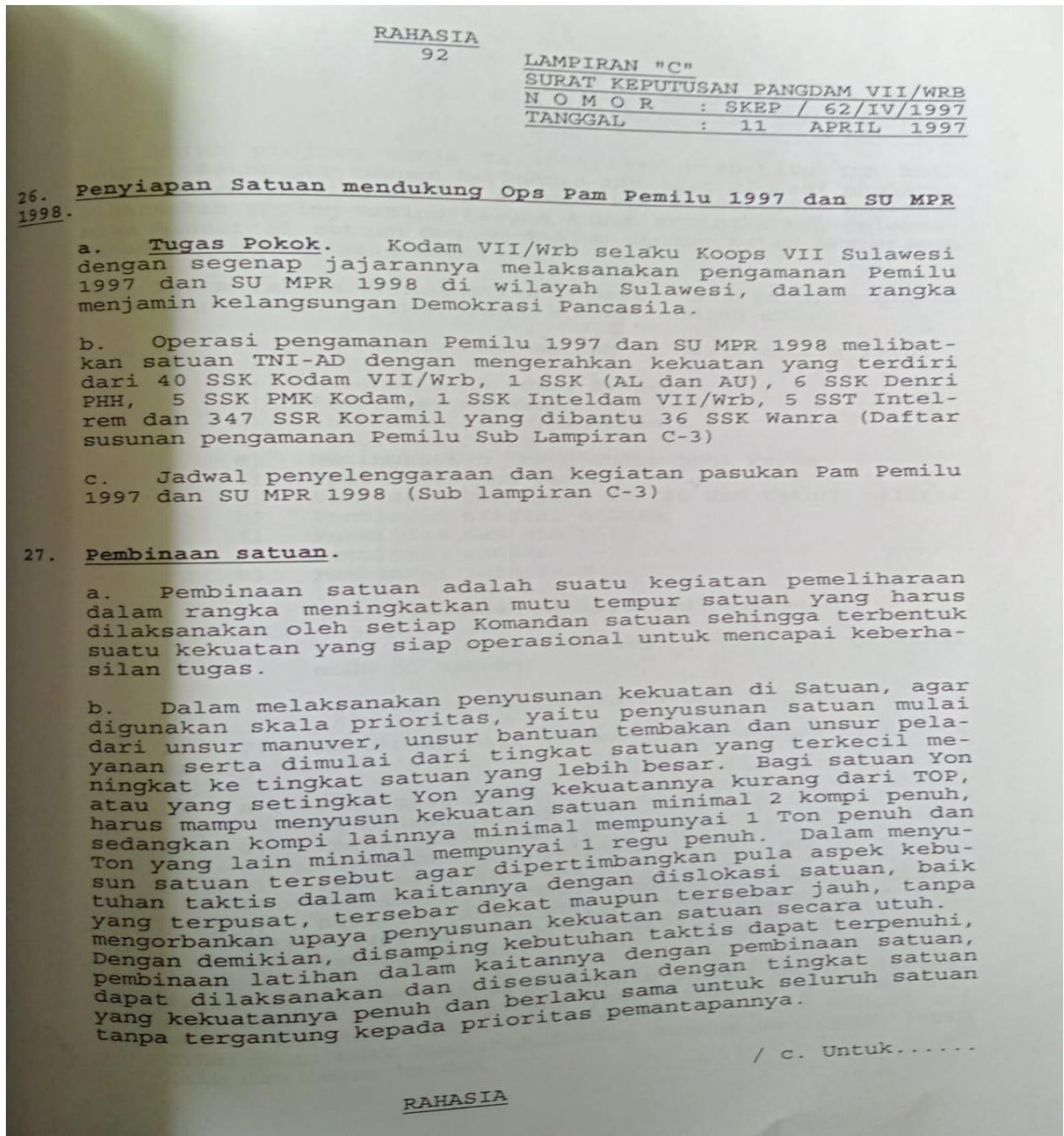
Z

Zainal Basri Palaguna 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Arsip dan Surat Kabar

Arsip Bintaljarahdam XIV/Hasanuddin



Fajar. Kamis, 4 Juni 1998.

Pangdam Berdialog Mahasiswa di DPRD

- PAMMI Tak Halangi Aktivitas Dewan

Ujungpandang, Fajar

Pergerakan Aksi Mahasiswa Makasar Indonesia (PAMMI) yang menggelar aksi moral di kantor DPRD Sulsel tidak menghalangi aktivitas para anggota dewan maupun kelompok lain yang ingin bertemu dewan. Selama enam hari pendudukan, anggota DPRD Sulsel tetap bisa melaksanakan aktivitasnya. "Jadi sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan PAMMI menghalang-halangi aktivitas anggota dewan selama ini," tegas salah seorang ketua Presidium PAMMI, Rabu kemarin.

Lahirnya pernyataan itu berkaitan banyaknya beredar isu yang menyebutkan bahwa keberadaan PAMMI di DPRD Sulsel, sudah mengarah kepada pergerakan politik, jauh dari konteks tuntutan reformasi yang sesungguhnya. Dan yang lebih disedihkan lagi kalau dituding yang menilai mahasiswa di kantor DPRD Sulsel hanya untuk berhura-hura.

"Ini yang perlu diluruskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar. PAMMI ke DPRD tidak lain untuk memperjuangkan adanya reformasi secara total baik di tingkat nasional maupun regional, utamanya di dalam upaya memerangi praktik-praktik kolusi, korupsi, nepotisme dan feodalisme," ujar mahasiswa.

Pada hari keenam pendudukan, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Suaidi Marasabessy dan Dandim 1408/BS Letkol Inf Drs S Widjonarko muncul di Kantor DPRD I berdialog dengan mahasiswa yang belum bersedia beranjak dari tempatnya. Pangdam dan Dandim 1408/BS singgah di kantor DPRD Sulsel-memantau perkembangan kegiatan yang dilakukan mahasiswa.

Kepada mahasiswa, Pangdam VII Mayjen TNI Suaidi Marasabessy berjanji siap berada di belakang mahasiswa, untuk memperjuangkan gerakan reformasi di segala bidang. Terutama mendukung upaya memerangi praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Bahkan Pangdam meminta mahasiswa di DPRD tetap melanjutkan perjuangannya.

Namun Pangdam mengharapkan agar tuntutan mahasiswa, tidak sampai menyinggung perasaan orang-perorang. Mengumpat orang lain bukanlah budaya orang Bugis-Makassar. "Dan hal itu harus dijauhkan dari pikiran kita semua," Pangdam menambahkan.

Selain itu, mahasiswa selalu melakukan pendekatan hukum, agar dalam memperjuangkan reformasi tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula perubahan yang diminta ini demikian besar dan luas yang sudah barang tentunya harus memerlukan waktu. Sebab, perubahan yang dikehendaki tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan.

Kedatangan Mayjen TNI Suaidi Marasabessy dan Letkol Inf Drs S Widjonarko cukup menarik perhatian mahasiswa. Bahkan ada di antara mahasiswa yang masih tertidur harus terjaga begitu mengetahui kedua pejabat ABRI itu memasuki halaman DPRD I Sulsel. Setelah menyempatkan diri berbincang-bincang dengan mahasiswa, Mayjen Suaidi Marasabessy dan Letkol Widjonarko melanjutkan perjalanan menuju Makodam VII Wirabuana.

Dalam diktum legalitasnya menyebutkan bahwa yang bergabung dalam PAMMI adalah institusi dari lembaga yang mempunyai garis koordinasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, anggota PAMMI terdiri atas lembaga atau institusi Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) atau SMPT dari setiap institusi. Terakhir PAMMI tidak menerima lembaga mahasiswa kecuali SMF/SMPT dari institusi masing-masing, termasuk yang ingin masuk atas nama person-person.

Pendudukan Kantor DPRD menurut sejumlah Presidium PAMMI, tidak bermaksud mengganggu atau menghentikan aktivitas anggota dewan. PAMMI juga tidak pernah mengklaim DPRD sebagai wilayah kekuasaan. Buktinya sejumlah kelompok tetap datang membawakan aspirasi. Bahkan PAMMI membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. "PAMMI berada di semua lapisan masyarakat dan selalu terbuka atas bantuan dan kritikan dalam bentuk apa pun," demikian PAMMI.

Setelah enam hari pendudukan Kantor DPRD I, PAMMI belum memperlihatkan isyarat akan segera meninggalkan tempat. Mereka tetap bersikeras menunggu Ketua DPRD I HM Amin Syam pulang dari Jakarta.

Rabu kemarin, mahasiswa berharap HM Amin Syam bisa muncul di Kantor

Bersambung ke Hal. 10



Mahasiswa dan pe-
aspirasi mengenai

GRR

- Hipma G

Sungguminasa, F
Aras reformasi r
ngental di Gowa. F
ri pernyataan toko
Gowa yang mena
Gerakan Reformasi
RG) yang kemarin
DPRD I Sulsel men
sikap.

Dalam pernyata
man itu, GRRG n
Gowa Syahrul Yas
mundur dari jabat
Gowa. Sebagai ba
ciptaan aparat pe
bersih dan berwit
juga meminta agar
bersihan, pengusi
sanksi kepada ap
yang terbukti meli
dan perlakuan di
pengusaha yang a

Kelompok toko
berjumlah 13 orang
agar menghentika
yek yang bersifat n
sekali tidak meny

Aksi Solid Unhas Bertemu Tim Pengkaji dan Revisi RUU Politik

Ujungpandang, Fajar
Sedikitnya 23 mahasiswa Ujungpandang yang tergabung dalam delegasi Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas (Solid Unhas) bertemu dengan Tim Pengkaji dan Pembentuk Rancangan Undang-undang Politik yang diwakili Prof Dr Ryzaas Rasyid MA selaku Ketua Tim di Kampus IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Jakarta.

Tim yang bertemu Jumat lalu tersebut, menurut Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas Aryanto Karma Wisata, merupakan tim yang dipersiapkan secara khusus mengenai dan berupaya mengahsilkan konsep perubahan sembilan Undang-undang bidang politik yakni, lima paket UU Politik, UU Otda, UU Kepresidenan, UU Penyehatan Pempdat, dan UU Etnika Pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, kata Aryanto, delegasi Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas menyampaikan visi dan agenda reformasi hasil pengkajian dari berbagai rangkaian simposium sebelumnya di Kampus Unhas. Secara garis besarnya, lanjut Aryanto, konsep yang diusulkan tersebut didasarkan pada pemir-

kiran bahwa informasi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Untuk itu, reformasi terhadap format politik, model pembangunan dan produk perundang-undangan yang selama ini tidak mencantumkan kepentingan rakyat mendasarkan untuk dilakukan.

"Dalam kerangka itu, agenda pembidayaan dan otonomi daerah sangat relevan diangkat. Mengingat selama ini sebenarnya telah terjadi penjarahan besar-besaran dan ketidakadilan terhadap daerah di segala bidang. Reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya," ujar Aryanto melalui press release yang dikirim ke redaksi Fajar kemarin.

"Solidaritas telah menyusun agenda reformasi beserta agenda dasarnya (jangka pendek maupun jangka panjang) dan sedang berupaya memotivasi publik dan memobilisasikannya," katanya. Tim Pengkaji dan Revisi Undang-undang Politik menang-

gapi agenda reformasi itu, jelas Aryanto, memaparkan agenda kerja mereka yang berupaya reformasi UU Partai Politik, sistem Pemilu, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang sedianya akan dihasilkan pada Agustus mendatang sebagai dasar untuk Sidang Umum Istimewa dan Pemilu mendatang.

Setelah prioritas reformasi UU Politik ini, mengutip penjelasan Ryzaas Rasyid, reformasi UU Otda dapat dilakukan. "Isi matriks positif agenda reformasi yang dihasilkan oleh Tim Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas dan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk tim yang diwakilinya," katanya.

Hanya saja, lanjutnya, menurut pengamat politik ini, harus ada kesediaan untuk mengakui bahwa kondisi-kondisi ideal yang didambakan dalam agenda reformasi itu membutuhkan waktu untuk mencapainya.

Pertemuan itu, kata Aryanto, diwarnai perdebatan mengenai kecenderungan polarisasi politik yang terjadi setelah bergesernya kepemimpinan nasional, dan kondisi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang makin berat. (k9/lim/B)

Tim ...
kolan dua orang atau lebih. Selanjutnya korupsi, persengkolan dua orang atau lebih dengan maksud merugikan negara. Karena itu, pihak kejaksaan mengimbau seluruh lapisan masyarakat yang berniat membantu silakan bergabung dengan tim kejaksaan tersebut. Kejaksaan terbuka untuk semua yang berniat baik. Para wartawan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lain, silakan. "Bantuan itu kami sangat membutuhkan," demikian Kajati Salsel HM Gagok Sobagyan-to SH. (zs-rp15-rp5/lim/D)

CV SINGA LAUT NIAGA
Jl. Dangka No. 15 Telp. 875420
Ujung Pandang

OPEN TIME
Juni '98 di...

Kareba
MOLISIRAWA

FAJAR
Harian Pagi Ujungpandang

Alamat: Jl. Dangka No. 15, Ujungpandang
Telp: 875420

Terbit 16 Halaman/Bulan Rp. 1.500,-

Mahasiswa Duduki Bandara Hasanuddin Penerbangan Lumpuh Total

Ujungpandang, Fajar
Ratusan mahasiswa Unhas kembali menduduki Bandara Hasanuddin minggu ini. Aksi mereka, merupakan aksi damai yang berlangsung selama tiga hari, untuk menuntut pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur pasal 100 WU dan untuk mengakhiri pelaksanaan pemberlakuan lima paket UU Politik yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar konstitusi dan hak-hak warga sipil.

Mahasiswa Unhas yang datang ke Bandara Hasanuddin dengan menggunakan tiga mobil truk ini langsung menancur petasan bunyir ke arah terminal. Petak terminal bandara sempat terkubur dan tidak sanggup menahan yang datang ke arah terminal. Mereka mengira mobil yang masuk pada pagi itu merupakan barang yang akan diklatir.

Pada pukul 14.00 WIB, petasan bunyir yang digunakan untuk menghancurkan terminal bandara Hasanuddin telah selesai. Petak terminal bandara Hasanuddin telah terkubur dan tidak sanggup menahan yang datang ke arah terminal. Mereka mengira mobil yang masuk pada pagi itu merupakan barang yang akan diklatir.



SIKAT GIGI FORMULA
DIPAKAI DAN TAHAN LAMA

labibie Nyatakan Belasungkawa
-PP tidak Terima Tap MPR Nomor 1

Empat Tewas, Puluhan Luka-luka
-Bentrokan Petugas dengan Mahasiswa Meluas

Kejadian bentrokan di Bandara Hasanuddin, Ujungpandang, Sabtu (13/11/98) telah menimbulkan empat tewas dan puluhan luka-luka. Bentrokan ini terjadi antara petugas keamanan dengan mahasiswa yang menduduki bandara.

Wakassar Unjukrasa Akbar, Makassar Macet Total

Syahrul Terpilih Jadi Bupati Gowa - Raih 32 Suara, Syuaib 4 dan Maddusila 3

Sungguminasa, Fajar
Dugaan banyak pihak di Gowa bahwa pemilihan bupati bakal dimenangkan oleh Syahrul Yasin Limpo akhirnya terbukti. Kemara, ditinjau dari prosedur demokrasi yang dipaparkan, Ketua DPRD Gowa Drs Malfungsat Makassar dan dua wakilnya M. Amin B dan Masruki, Syahrul berhasil meraih sebanyak 32 suara, disusul Syuaib Malsimbati 4 suara dan A. Maddusila A. De dengan 3 suara.



Syahrul Yasin Limpo

Sementara tiga calon yang ditunjukkan dalam pemilihan itu, hanya Syahrul yang memenangkan 32 suara. Sedangkan dua calon lainnya yaitu Syuaib dan Maddusila, masing-masing hanya meraih 4 dan 3 suara. Syahrul sendiri meraih 32 suara dari 64 pemilih yang hadir. Sedangkan Syuaib dan Maddusila masing-masing hanya meraih 4 dan 3 suara.

kehadiran wakil rakyat yang mewakili masyarakat. Syahrul sendiri menang dengan meraih 32 suara, Syuaib 4 suara, dan Maddusila 3 suara.

Pada pemilihan Bupati Gowa kemarin, diwarnai dengan suasana yang penuh dengan semangat. Banyak pemilih yang datang ke TPS dengan membawa bendera-bendera partai politik. Banyak pula yang datang dengan membawa bendera partai politik. Banyak pula yang datang dengan membawa bendera partai politik.

Makassar, Fajar
Puluhan ribu mahasiswa Makassar menyuarakan dukungan mereka kepada Syahrul Yasin Limpo sebagai bupati Gowa. Mereka berkumpul di depan gedung DPRD Gowa dan berunjukrasa dengan membawa bendera-bendera partai politik.



Asai mahasiswa Makassar yang menuntut Sulawesi Merdeka yang masih bertajuk semangat.

Unhas sebagai organisasi mahasiswa yang terbesar di Makassar, telah melakukan unjukrasa yang sangat besar. Mereka berkumpul di depan gedung DPRD Gowa dan berunjukrasa dengan membawa bendera-bendera partai politik.

Unhas sebagai organisasi mahasiswa yang terbesar di Makassar, telah melakukan unjukrasa yang sangat besar. Mereka berkumpul di depan gedung DPRD Gowa dan berunjukrasa dengan membawa bendera-bendera partai politik.

Mahasiswa Unhas, Bersatulah!

Mahasiswa kampus ini, memang ternyata bisa bersatu. Ketika Ra dalam suasana kebersamaan. Inilah jawab dari tagarada miring, yang mengatakan mahasiswa Unhas sulit bersatu?

Membudak Mahasiswa Unhas Unhas benar-benar memenuhi panggilan persatuan. Tanpa komando, mahasiswa dari berbagai fakultas melorot dalam satu ikatan kebersamaan. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa di kampus mereka masih ada satu kesatuan, satu tujuan dan satu komitmen untuk memperjuangkan nasib bangsa tercinta ini. Itu terjadi ketika beberapa lembaga mahasiswa bergabung dan bersatu-sama menggelar rapat akbar mahasiswa Unhas.

Pemecahan dari artinya yang pertama, adalah enam tahun silam, waktu itu diadakan kongres nasional SDSE. Banyak mahasiswa yang datang ke kongres itu karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara.

Besarnya, maka kita bisa mengatakan bahwa mahasiswa Unhas adalah mahasiswa yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara.

Sekali lagi, kita butuh kebersamaan dalam bertindak untuk menyekapi Indonesia nasional, tandas Sudirman HN.

Aksi Solidaritas Atas Hilangnya Sejumlah Aktifis Mahasiswa

Agaknya insiden bentrokan mahasiswa dan pihak militer di UGM, UI serta hilangnya sejumlah mahasiswa di Indonesia menimbulkan reaksi keprihatinan dan memunculkan solidaritas mahasiswa Unhas. Wujud aksi keprihatinan itu dengan digelar mimbar bebas mahasiswa yang diprakarsai tiga senat mahasiswa antara lain senat Sastra, Sospol dan Ekonomi.

Para peserta mimbar tak seperti biasanya. Nampak wajah mereka diliputi duka bercampur kemarahan di Pelataran Kopma Unhas Kamis 9 April lalu. Di atas mimbar bebas, para aktifis dan fungsionaris menyalurkan aspirasi yang mengendap serta kecemasan atas kejadian yang menimpa mahasiswa di Pulau Jawa dan Sumatera. Kecaman demi kecaman atas duka yang menimpa aktifis mahasiswa mengalir dan mewarnai suasana mimbar itu.

Yang aneh, hilangnya para aktifis mahasiswa di Indonesia dinilai para peserta mimbar bebas, bahwa aparat negara terkesan lepas tangan. Mereka seakan tidak bertanggung jawab terhadap warga negara yang hilang itu. Itu agaknya membuat sejumlah aktifis mahasiswa berang. Tentu saja para mahasiswa Unhas mempertanyakan tanggung jawab yang diemban aparat negara. Mereka menggugat tanggung jawab atas hilangnya sejumlah aktifis mahasiswa UGM maupun di UI.

"Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya para mahasiswa itu. Siapa?" kecam Makbul Halim mempertanyakannya, nampak raut wajah putus asa, sedih dan penuh keiri serta sejumlah aktifis juga dialami rasa solidaritas.

"Terus-terang kami sangat sedih dan berduka atas hilangnya mahasiswa Indonesia yang tua Senat Sastra, ikuti dimana," kata Asri ketampak dapat ditafsirkan bagaimana suara keprihatinan para aktifis dan massa terhadap penculikan sejumlah mahasiswa di Indonesia.

Nampaknya, keprihatinan dan tuntutan mahasiswa berganda. Selain pernyataan duka serta solidaritas atas hilangnya sejumlah mahasiswa di pulau jawa, juga keprihatinan terhadap kesungguhan pemerintah terhadap reformasi ekonomi, politik, hukum. Selain itu mahasiswa juga menuntut reformasi di lembaga pemerintahan secara tegas dengan menciptakan 'clean government' yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tidak puas aksi mimbar di depan Kopma, massa bergerak sekitar 100-an menuju DPRD Tk I Sulsel mengendarai enam mobil pete-pete Kampus Unhas.

Di lantai dua Gedung DPRD Tk I Sulsel, mahasiswa membentangkan spanduk. Dikirikan spanduk, berdiri umbul-umbul merah putih. Bendera di depan DPR diturunkan setengah tiang, sebagai tanda duka. Selanjutnya mahasiswa dengan tertib duduk melingkar sambil menggelar mimbar bebas. Selang beberapa menit kemudian petugas keamanan tiba, lalu berdiri tegap di depan pintu DPRD dengan pistol di pinggang dan senapan digengaman. Tak digubris, mimbar ala mahasiswa pun berlanjut dengan waris bil berpikato penuh semangat. Orasi demi orasi reformasi dari mahasiswa merebut semerambat para peserta demonstrasi merebut suasana duka dan renungan ter.

Setelah puas menyampaikan sejumlah keprihatinan, mahasiswa kembali ke kampus dengan mengendari pete-pete kampus serta mobil Unhas secara terpisah-pisah (tsh).

Rona Lain Demonstrasi

Tamalanrea, Rabu 20 Mei 1998. Pagi itu menunjukkan pukul sembilan lewat. Sinar sang surya terasa mulai menyengat kulit. Jalan Perintis Kemerdekaan yang kini berubah menjadi Jalan Reformasi, di depan pintu I kampus Unhas kembali macet.

Seperti hari-hari sebelumnya semenjak aksi demo mahasiswa makin marak, ribuan mahasiswa Unhas tumpah ke jalan. Kali ini, jumlahnya jauh lebih besar dibanding aksi-aksi sebelumnya. Jaket merah menyemut, baik yang long march, maupun yang berkendaraan beriringan menuju satu tujuan: Lapangan Karebosi.

Matahari makin tinggi ketika iring-iringan itu bergerak perlahan. Teriakan-teriakan menuntut reformasi kerap terdengar. Kata-kata turunan Soeharto, Gantung Soeharto, Hidup Rakyat hiruk-pikuk mengumandang. Diiringi kepala-kepala tangan nan penuh semangat.

Di sisi jalan, masyarakat menyambut reformis-reformis muda itu dengan antusias. Seringkali mereka meneriakkan yel-yel reformasi. Bahkan hampir di sepanjang jalan, masyarakat yang dilalui rumahnya menyediakan makanan dan minuman. Malah ada yang membagikan rokok, permen dan apa saja yang dapat mereka berikan semampunya. Tua, muda, parob baya sampai anak kecil seolah berlomba menyemangati mahasiswa.

Tira, salah seorang karyawan bank yang ikut menyemangati mahasiswa dengan berteriak-teriak.

dia absen kerja lantaran tak ingin melewatkan aksi mahasiswa. Karenanya, ia begitu bersemangat membagikan Air Aqua dan bungkus kuc pada mahasiswa yang lewat. Sembari membagikan panganan, ia pun tak henti-hentinya menyemangati mereka. "Teruslah berjuang, kami mendukungmu," katanya tak putus-putus. "Sungguh mengharukan," ujar Abd. Mu'li, mantan Ketua Maperwa Kedokteran Unhas ini. Inilah, katanya, gambaran persamaan nasib yang mesti ditanggung akibat sistem yang bobrok.

Bahkan, Prof Halide, Drs Alwi Rahman MA, Hamid Paddu MA dan beberapa staf dosen yang juga ikut long march sampai di Karebosi, hampir tak pernah melepaskan senyumnya melihat pemandangan itu. Tak sungkan penduduk menyodorkan minuman pada mereka. "Inilah bukti mendukung kita, karenanya tak ada jalan selain maju terus," ucap Prof Halide penuh semangat.

Sebuah toko kelontong di Jalan Urip Sumoharjo tampak ramai dikerubuti jaket merah. Rupanya di toko itu ada pembagian rokok gratis. Malah Fahmi, salah seorang mahasiswa Fakultas Teknik mampir ingin membeli rokok. "Mau beli berapa bungkus?" tanya pedagang rokok itu.

dibayar. Fahmi, yang tentu saja senang tetap saja menyodorkan uang itu. Ia khawatir disangka memeras. Apalagi pemilik toko itu adalah seorang warga keturunan. Tapi sang pemilik toko yang tak mau disebut namanya itu tetap saja menolak. Usut punya usut, ternyata ia memang sengaja menyediakan rokok itu untuk para reformis. "Itu masih banyak, panggil teman-temanmu yang mau," katanya sembari menunjuk beberapa sloop rokok di atas meja. Mahasiswa lain yang sempat melihat adegan itu tak mau melewatkan kesempatan, apalagi sang pemilik toko menawari mereka. Mereka tersenyum kegirangan. "Terima kasih Pak atas diskon seratus persennya!" ucap mereka hampir bersamaan. Sang pemilik toko pun tersenyum puas, membantu pejuang-pejuang muda itu tidak datang tiap hari. "Saya sangat bangga dengan perjuangan mereka dan hanya ini yang bisa saya lakukan," tuturnya.

Beberapa kantor baik negeri maupun swasta seperti tak mau kalah. Karyawan mereka juga turut membagikan air mineral dan makanan. Sambil meneriakkan kata-kata yang kian membangkitkan semangat.

Tring-iringan itu makin beringsut perlahan di bawah terik matahari yang kian menggigit. Tanggapan simpatis kian mengalir dari masyarakat. "Dan perjuangan mereka yang tak kenal lelah."

Selamat Datang Orde Reformasi

Runtuh sudah rezim Orde Baru. Presiden Soeharto yang banyak menoreh tinta hitam dan mengukir sejumlah prestasi besar atas kemajuan negara ini, akhirnya mengundurkan diri secara terhormat. Tepat Pukul 10.05 Wita, 21 Mei. Selamat datang Orde Reformasi

Jabatan yang lowong itu, sesuai dengan konstitusi diserahkan kepada Wapres Prof Dr BJ Habibie di hadapan Mahkamah Agung. Menakjubkan! Rasa gembira, hari campur baur menyatu dalam dada sukma rakyat Indonesia, terkhusus mahasiswa Indonesia, ketika atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Presiden Guek yang memiliki sejumlah catatan hitam sekaligus bapak pembangunan RI ini, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden RI. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, hari Kamis 21 Mei 1998 saya berhenti dari jabatan sebagai presiden Republik Indonesia", jelasnya dengan nada datar.

Kontan, ratusan juta jiwa rakyat Indonesia yang memelototi layar televisi sontak kapet, gembira, sekaligus terharu. Apalagi, banyak pihak yang menilai Soeharto belum akan mengundurkan diri dalam waktu dekat ini. "Luar biasa", pa-

ah kemusuk ini, akhirnya bertindak di luar dugaan. Malah, sikap tenangnya, menunjukkan betapapun jenderal yang ber Bintang Lima ini dicemooh sebagai seorang diktator dan biangnya KKN (Korupsi, Korupsi dan Nepotisme), di lain sisi ia memang laik disebut sebagai seorang negarawan sejati. "Betapapun jeleknya. Sikap pengunduran Soeharto, adalah suatu sikap negarawan," urai Dahlan wartawan Harian Surya.

Layaknya sebuah kemenangan, secara spontan dan sporadis, beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pun langsung turun ke jalan dan menyalami masyarakat yang lalu lalang di jalan umum. Unhas saja, puluhan aktifa, guru besar, Rektor Rudi A.Gany turut merayakan kemenangan mahasiswa, dengan langsung berdiskusi. "Hari ini benar-benar milik mahasiswa. Selamat datang Orde Reformasi" kata PR III D...

Sementara orang merayakan pesta kemenangan, Budayawan muda yang juga seorang sastrawan Makassar punya pendapat lain soal kemenangan mahasiswa. "Saya memiliki kekaguman ikhlas atas usaha dan perjuangan mahasiswa menurunkan Soeharto. Mahasiswa seperti meruntuhkan sebuah tembok besar ketakutan yang selama ini mengurung rakyat Indonesia. Mahasiswa membuka kembali keberanian banyak orang untuk mengatakan yang benar," urai Aslan A. Abidin.

Namun ia mengingatkan kemenangan ini, hendaknya dijadikan mahasiswa sebagai titik beranjak untuk mengisi dan memperbaiki kondisi negara secara intelektual. "Semoga juga tidak muncul pahlawan-pahlawan kesiaangan yang justru lebih buruk dibanding rezim Soeharto. Ini hal yang sering terjadi setiap ada perubahan besar. Seseorang tiba-tiba merasa harus diakui sebagai pahlawan, kata Ketua Masyarakat Sastra Tamalana ini mengingatkan.

Yang pasti keruntahan rezim Orde Baru, hendaknya menjadi catatan besar dalam agenda perubahan Republik ini di masa depan. Jangan samani sejarah hitam re-



Ujungpandang Digoyang Demonstrasi Mahasiswa UMI

Orang Luka Parah, Sepuluh Diamankan di Makodim

Ujungpandang, JP.-
Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujungpandang kemarin menggelar demonstrasi di depan kampusnya, Jalan Urip Sumartono, Inilah aksi terbesar mahasiswa sejak demonstrasi helm tahun 1987. Aksi kali ini melibatkan sekitar seribu mahasiswa UMI dari berbagai fakultas.

Mereka menguasai jalan selama tiga setengah jam dengan membajak sebuah bus DAMRI yang diparkir melintang di tengah jalan setelah diprakerami ramai-ramai, sebelum akhirnya disingkirkan petugas dan didesak masuk ke dalam kampus. Dalam kampus pun, mahasiswa terus memprotes perlawanan dengan lemparan batu. Petugas berhadapan dengan menierbakkkan gas air mata untuk membakar ke udara. Selama sekitar enam jam, jalan Ujungpandang macet total.

Aksi kemarin merupakan kali kedua yang dilakukan mahasiswa UMI sebagai sikap protes terhadap kenaikan tarif jasa angkutan. Sehari sebelumnya, mereka mendatangi kantor gubernur, Ujungpandang serta membakar ban bekas di jalan depan kampus.

Sebelum protes ini berawal dari keluarnya SK Walikota Ujungpandang tentang tarif angkutan di kota. Untuk semua trayek, dipasang tarif sama, Rp 500. Berdasarkan SK Walikota itu, mahasiswa diberi diskon sampai 40 persen, jadi Rp 300. Tetapi kenyataan di lapangan, sopir tetap tetap menarik bayaran Rp 500.

Sebelum bertentangan fisik dengan petugas dalam kemarin, lima mahasiswa luka berdarah dan diangkut ke rumah sakit Pelamonia. Setelah itu, 10 pentolan mahasiswa diamankan dibawa ke Makodim. "Saya memang yang diamankan mereka dibawa pergi. Tetapi bukan ditangkap, hanya diamankan," kata Dandim Ujungpandang Letkol Art Sabar Yudo. Sabar sangat menyesalkan kejadian tersebut. Petugas, kata dia, sudah mencoba mengajak mahasiswa berdialog, tetapi reaksi mereka justru. Itu sebabnya, petugas mengambil tindakan. "Saya bertanggung jawab mengamankan ini. Mereka sudah menguasai jalan selama lebih dari itu sangat merugikan masyarakat umum," katanya.

Dandim menyatakan tidak menyalahkan mahasiswa tetapi juga tidak menyalahkan petugas yang turun tangan melakukan pengamanan. Kondisi ini memang sudah menuntut

demikian," ujarnya.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 12.30 WITA. Ratusan mahasiswa berkumpul di depan kampusnya dan menghentikan kendaraan yang lewat. Sebuah bus DAMRI dihentikan, penumpangnya disuruh turun dan sopirnya diperintahkan memarkir bus tersebut melintang di tengah jalan. Setelah itu, bus dikeprak ramai-ramai, kaca-kacanya berantakan, bannya dikempiskan. Dua aki bus dibongkar dan dilempar ke tepi jalan. Penutup bensin sudah terbuka, untung saja tidak ada yang menyulutnya.

Mahasiswa UMI lainnya yang tadinya berada di dalam kampus, berhamburan keluar. Ribuan mahasiswa ini memenuhi jalan, sehingga arus kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif. Meski petugas Sabhara dan Brimob sudah diturunkan, mahasiswa tetap bertahan menguasai jalan.

Dandim 1408 Ujungpandang, Letkol Art. Sabar Yudo, mengajak mahasiswa berdialog. Bahkan dia menyatakan siap mendampingi mahasiswa ke DPRD. "Ah, bosan Pak. Kami sudah ke DPRD, bahkan sudah ke gubernur. Tetapi tetap tidak ada keputusan," timpal seorang mahasiswa.

Tak lama kemudian, muncul Kapoltabes Ujungpandang Kolonel Pol Drs Andi Hasanuddin. Dia juga mencoba menenangkan mahasiswa, tetapi tak ada hasil. Mahasiswa tetap ngotot menguasai jalan sampai ada keputusan bahwa tarif angkutan diturunkan. Mereka menuntut kepastian bahwa tarif mahasiswa yang mendapat diskon 40 persen dari tarif umum, segera diberlakukan.

Sementara itu, satu Detasemen dari Armed berjaga-jaga di sekeliling kampus, bersama satu kompi pasukan brimob. Pukul 15.00 WITA, ketika mahasiswa masih tetap bertahan dan terus menolak tawaran-tawaran yang diajukan Dandim dan Kapoltabes, pasukan Armed dan Brimob menyerbu dan mendesak mahasiswa masuk kampus.

Bentrokan fisik tak terhindarkan. Mahasiswa melawan dengan melemparkan batu ke arah petugas. Petugas tetap memburu mahasiswa hingga masuk ke kampus. Puluhan mahasiswa kena batuan rotan dan pentungan. Bentrokan fisik ini terus berkembang secara sporadis selama dua jam.

Pejabat militer daerah itu segera berdatangan. Kasdam VII Wirabuana Brigjen TNI Fachrul mengajak mahasiswa berdialog secara langsung. Sekitar setengah jam dia mendengarkan tuntutan mahasiswa. Setelah itu, ia mendengarkan mahasiswa lewat pengeras suara dari mobil pemadam kebakaran. (asm)

"Kali ini Mahasiswa, Bukan Teroris"

bukan teroris yang mengajukan tuntutan adalah mahasiswa

nya secara baik institusi dan me- semestinya dilakukan jaminan atas peristiwa kerusuhan ini.

"Lompat Sungai karena Dikejar-kejar Petugas"

MAHASISWA Sulsel benar-benar berduka. Tiga mahasiswa UMI — Syaiful, Sultan, dan Adnan — akhirnya ikut menjadi korban. Ketiganya tewas tenggelam di Sungai Pampang, samping kampus UMI. Syaiful meninggal setelah dirawat di RS 45 Rabu malam lalu, sedangkan Sultan dan Adnan ditemukan terapung Kamis siang kemarin.

Dandim 1408 Ujungpandang Letkol Art Sabar Yudo dan Kepala Penerangan Kodam VII Wirabwana Letkol CKU Mochtar Darise kepada wartawan Rabu malam menyatakan, mahasiswa yang tewas tenggelam itu terpaksa menyeberangi sungai karena takut dilempari oleh teman-temannya sendiri. "Mahasiswa pengunjuk

rasa mengajak temannya yang lain untuk ikut. Bila menolak, mereka akan dilempari," ujar Mochtar Darise.

Namun, seorang mahasiswa UMI kemarin menuturkan kejadian yang menimpa ketiga rekannya itu.

Menurut mahasiswa yang minta namanya tidak disebutkan ini, mereka nekat melompat ke sungai karena dikejar-kejar petugas. "Kami ketakutan. Apalagi ada panser yang masuk kampus dan juga terdengar letupan keras seperti tembakan senjata laras panjang," tuturnya.

Menurut mahasiswa ini, Rabu sore itu sedang berlangsung perkuliahan. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa mahasiswa akan di-

ungsikan keluar kampus, sehingga semua kegiatan dihentikan. Mahasiswa ini, bersama Syaiful dan Adnan, bersamasama keluar kampus.

Belum lagi mereka mencapai jalan raya, petugas sudah berdatangan. Sebuah mobil panser juga meraung-raung masuk kampus. Juga terdengar letupan keras seperti bunyi tembakan. "Kami serabutan lari ke belakang kampus," tuturnya.

Menurut mahasiswa ini, Syaiful dan Adnan sebenarnya mengajak untuk segera lompat. "Tapi saya menolak dan terus berlari ke belakang kampus. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keduanya setelah saya tinggal," tuturnya. (asm)



BERDIALOG — Presiden Soeharto hari Sabtu (12/3) menerima para peserta Temu Konsultasi Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Bina Graha. Kepala Negara didampingi Ketua Umum KNPI, Tubagus Haryono (kiri) berdialog dengan para peserta Temu Konsultasi Nasional KNPI

KOMPAS, MINGGU, 13 MARET 1994

SAYA TIDAK BERAMBISI JADI PRESIDEN SEUMUR HIDUP, KENAPA RIBUT-RIBUT

Jakarta, Kompas. Presiden Soeharto menegaskan sekali tidak berambisi untuk menjadi presiden seumur hidup. Kepala Negara juga mengingatkan agar masalah suksesi jangan diributkan, karena bisa menghancurkan negara dan bangsa ini. "Soalnya masih banyak yang belum dihasilkan di negeri ini," kata Presiden dalam suatu dialog penuh santai ketika menerima sekitar 150 orang anggota KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Bina Graha, Jakarta, hari Sabtu (12/3). "Kapan saya berhenti jadi Presiden? Nanti, setelah saya mempertanggungjawabkan tugas saya setelah lima tahun. Jadi lima tahun lagi baru saya

berhenti. Saya tidak setengah-setengah dalam melakukan tanggung jawab," kata Kepala Negara. Seorang anggota KNPI dalam kesempatan itu bertanya, "Apakah Bapak tidak mempersiapkan calon pengganti Bapak, sehingga dapat melanjutkan pembangunan yang sekarang?" Jawab Presiden Soeharto, "Mekanisme dan sistemnya sudah ada. Dan orangnya juga sudah ada, yakni satu dari 180 juta orang. Masih tidak ada satu dari 180 juta orang yang mampu jadi Presiden. Silakan berkompetisi, siapa putra terbaik dan berprestasi untuk dilihat rakyat. Baik itu dari pemerintah, ABRI, sipil atau swasta,

untuk dilihat rakyat, dipilih dan ditentukan MPR jadi presiden. Cari dari sekian banyak orang tersebut, pasti ada. Saya tidak berambisi jadi Presiden seumur hidup, kenapa ribut-ribut." Kemudian Presiden menjelaskan, mengapa ia tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Kepala Negara, melepaskan jabatan Presiden di tengah jalan, itu bersifat setengah-setengah dan bisa berarti pula sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, UUD 1945, yang menetapkan masa pertanggungjawaban Presiden lima tahun. "Kalau orang melanggar konstitusi, sama saja dengan melanggar hukum," kata Kepala Negara.

Agum Gumelar:

Bukan Masanya Pendekatan Kekerasan

UJUNGPANDANG yang tempo dulu dikenal sebagai Kota Makasar termasuk daerah panas dengan penduduk yang temperamental. Tahun 1983, misalnya, ketika sebagian pemuda dan mahasiswa ketika sebagian pemuda dan mahasiswa ungkap rasa antipemaksaan helm, ada lima pemuda harapan bangsa tewas akibat benturan dengan petugas. Atau, April 1988 ketika ada unjuk rasa anti pemaksaan angkutan kota, tiga mahasiswa tewas. Juga akibat kekerasan.

Akan tetapi, medio September 1997, ketika terjadi kerusuhan yang jauh lebih hebat dari kedua contoh di atas, kali ini tidak sebatas pelajar pun yang menyalah dari senjata ABRI yang ditunjukkan kepada pengunjuk rasa. Inilah pendekatan perusuf yang diluncurkan Mayor TNI Agum Gumelar ketika menjabat Panglima Kodam VII Wirabona.

"Pendekatan militer atau kekerasan tidak tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini," ujar Komandan Kopasus seperti ini," ujar Komandan Kopasus 1993-1994, yang sejak 7 Mei 1998 menjabat Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lembanas) menggantikan Letjen TNI Soelan Efendi.

Isa menjelaskan, dalam suatu pertempuran, kita berada dalam keadaan membunuh atau dibunuh. Tapi, dalam berbagai unjuk rasa, yang kita hadapi bukan bukan musuh. Itu adalah bangsa kita sendiri," ungkap Agum yang dilantik sebagai Pangdam VII Wirabona, Sulawesi, pada 1 Agustus 1998.

Agum terjun langsung menghalangi terjadinya perusakan lebih lanjut untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. "Kalau menggunakan kekerasan, malah akan lebih parah akibatnya. Selain dapat merusak citra ABRI yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, juga menghardarkan adanya reaksi dunia yang patri bisa merusak citra bangsa Indonesia secara keseluruhan," papar Kasdam Bukit Barisan 1994 - 1998 tersebut.

Deyong Kurnawan, seorang pengusaha di Jalan Veteran adalah salah seorang yang melihat langsung panglima mencegah perusakan atas kantor dan tokonya. "Saya sangat berterima kasih pada panglima, sebab berhasil mencegah perusakan toko saya dan masyarakat sekitar pun tidak ada yang terluka," aku Deyong yang akrab dipanggil Ayong tersebut.

Tidak banyak yang tahu bahwa ketika Anthe lewat tanggal 15 September sekitar jam 20.00, panglima menghulung keluarga yang berduka agar pemakaman dilaksanakan malam itu juga. "Tika dimakamkan besokkan hartanya pada siang hari, mal jam beres atau waktu sekolah, maka kerusuhan akan jauh lebih hebat. Sebab, para pengantar jenazah akan berubah menjadi massa yang ganas dengan hati yang beresimot dendam," demikian panglima mengungkapkan pendekatannya.

Maka, ... langkah lagi nyata terjadi.



Mayor TNI Agum Gumelar

Pemakaman pun dilakukan antara pukul 02.00-03.00 di awal hari Selasa 16 September 1997.

Puncak kerusuhan memang terjadi tanggal 16 September tapi sebenarnya ini terpicu oleh pembentakan koran-koran pagi yang menyebarkan informasi lawasnya Anthe, anak semata wayang sebuah keluarga, oleh barisan orang gila.

Kebijakan Agum mengatasi perusakan Gengas pendekatan perusuf tentu saja tidak berarti Agum membenarkan terjadinya kerusuhan.

PADA hari-hari terakhir ini, di saat-saat maraknya unjuk rasa menyerukan perlunya reformasi politik dan reformasi ekonomi, sentuhan kebijakan —sentuhan antikerasan— Agum tetap terasa. Namun, ia juga menekankan pengunjuk rasa pun tidak boleh merusak.

Salah satu kebijakan yang paling meyejukkan dari Agum Gumelar terjadi pada hari terakhir kampanye Pemilu 1997 lalu.

Ketika itu, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) terlihat saling melempar batu dengan salah satu koestestan Agum Gumelar masuk ke dalam kampus UMI berteling dengan mahasiswa dan minta maaf, karena dia tidak mampu melindungi mereka dari lemparan batu salah satu koestestan.

Pernyataan maaf model begini memang sudah langka di era arogansi saat ini. Maka ... mahasiswa UMI tersebut, serjend bahwa ada jenderal dari korps baris merah tidak mau "berkelelah", malah minta maaf. Alhamdulillah, pendekatan berhasil meredakan perang hafa hari itu dan amanah pelaksanaan kampanye sempat pascapemilu di seluruh wilayah Kodam VII Sulawesi.

PRIA kelahiran Tattalimalaya 1 Desember 1945 itu terjun sebagai anggota ABRI tahun 1968 dengan pangkat letnan dua setelah lulus dari Akademi Militer Nasional, Magelang. "Saya ini ABRI, hobi saya olahraga. Jangan sampai ada kesan terbalik, profesi olahraga, hobinya ABRI," pinta jenderal yang beristrikan Linda Anahassari dan beranak dua tersebut.

Agum yang menguasai bahasa Mandarin secara aktif itu pernah menjadi komandan peleton di Siliwangi, lalu bergabung dengan pasukan para yang saat itu bernama Kopassandha dan kemudian berubah lagi menjadi Kopasus. Ia pernah pula menjadi Satgas Intel Kopasandha.

Berbagai jabatan dan tugas dilaksanakannya, sampai kemudian menjadi Danrem di Bondarlampung (Bukit Barisan) tahun 1992, kemudian masuk RADS ABRI

seterusnya menjadi Dankopasus. Ia menjadi Kasdam Bukit Barisan 1994 - 1996, kemudian transit enam bulan selaku staf ahli Pangab bidang Polkam, untuk selanjutnya memegang jabatan Pangdam Wirabona 1 Agustus 1998.

Selanjutnya, tibalah kita ke hari Kamis Itri, saat Agum Gumelar dilantik selaku Gubernur Lambanas.

SENTUHAN—sentuhan lain yang manusawi dari Agum nampak pula di balik kerusuhan Ujungpandang medio September. Di tengah-tengah "hafa" tersebut ia menemukan dua ... situasi yang terpedam di antara sekian banyak mutiara-mutiara yang bertaburan di wilayah Kodam VII.

Yang pertama seorang pria bernama Junaidy Saleh. Dia adalah ayahanda Annie Mujahidah Basunah, anak semata myang yang menjadi korban pembunuhan seorang manusia gila.

Agum mengisahkan, "Coba bayangkan bagaimana perasaan dan situasi hati Pak Junaidy itu dengan kematian putri semata wayangnya itu. Tapi, toh dia tampil di televisi dan berkomentar bahwa dia lebih sedih lagi dengan kerusuhan yang timbul akibat kematian anaknya. Kepada masyarakat Ujungpandang ia mengimbau, "Janganlah membenci anak saya di alam kuburnya dengan perbuatan dosa yang mengtinggi kematiannya."

Agum menilai Junaidy sebagai manusia beriman yang berhati emas. Junaidy mengajukan pesetujuan dan kematian. Dia menyerukan untuk saling memaafkan. Padahal dia adalah manusia pertama yang seharusnya mengemukakan permohonan terhadap putri terayangnya.

Mutiara kedua yang ditemukan panglima adalah seorang Daeng Becak yang bernama Mustafa. Dia itu menyaksikan perjarahannya sebuah toko di depan matanya. Ia menעות siraman sambil duduk di atas becakny.

Ketika seorang wartawan yang meliput kejadian tersebut bertanya kepada Mustafa, mengapa tidak ikut ambil barang yang tinggal pangut di jalan. Daeng Becek itu menjawab, "Saya tidak mau memberi makan tentara dan anak-anak saya dari ruyak yang harau!"

Beberapa hari panglima memerintahkan pelacakan kepada Mustafa. Dan, dengan bekal foto dari wartawan tadi, Mustafa barulah ditemukan penglima pada 3 Oktober 1997.

Kepada kedua mutiara tersebut, panglima memberinya Penghargaan Wirabona pada Hari ABRI, 5 Oktober 1997, suatu penghargaan tertinggi dari Kodam VII Sulawesi Plus sebuah hadiah bagi keluarga Junaidy dosen perguruan tinggi agama Islam di Ujungpandang. Untuk Masjid Annes Mujahidah Basunah.

(Nama Asli: Abu Takim, Mustaf)



SALAM PERPISAHAN — Letjen TNI Agum Gumelar bersalaman dengan Mayjen TNI Suaidi Marasabessy usai upacara serah terima jabatan yang dipimpin Wakil KSAD Letjen TNI Sugiono di Lapangan Karebosi Ujungpandang, Senin (18/5).

Mayjen TNI Suaidi Marasabessy Pangdam Wirabuana

Ujungpandang, Kompas

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Subagyo Hadistswoyo, meminta agar prajurit, aparat terkait, dan tokoh masyarakat senantiasa sejalan dalam dialogis dalam nuansa kebersamaan. Dalam dialogis sebagai wadah untuk mencari pemecahan terbaik mengatasi gejala sosial yang berkenaan dengan akhir-akhir ini sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter yang cukup memprihatinkan.

Hal itu diungkapkan KSAD dalam sambutan yang dibacakan Wakil KSAD, Letjen TNI Sugiono, pada serah terima jabatan Pangdam Wirabuana di Ujung-

pandang, Senin (18/5), dari Letjen TNI Agum Gumelar kepada Mayjen TNI Suaidi Marasabessy. Pejabat baru itu sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi KSAD, sedang Agum Gumelar sejak 18 Mei 1993 menjabat Gubernur Lembang.

Berkaitan dengan kondisi sekarang yang diwarnai berbagai gejala sosial, KSAD meminta pula kepada seluruh jajarannya agar senantiasa membina kemitraan masyarakat demi persatuan dan kesatuan bangsa. "Kemajemukan masyarakat dalam suatu wilayah hendaknya bisa dibina dengan baik, kemudian diarahkan dan dijadikan perekat dalam memelihara per-

satuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Di samping itu, KSAD mengingatkan kepada prajurit agar selalu berada dalam kondisi kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi berbagai tugas, khususnya tugas pengamanan dan menyukseskan jalannya pembangunan nasional.

Mayjen Suaidi Marasabessy, lulusan Akabri 1971 dan ayah dua anak hasil perkawinan dengan Eri Mesrawaty, pada tahun 1994 menjabat Asisten Operasi Kasdam IV Diponegoro, kemudian naik menjadi Wakil Asisten Operasi Kasdam ABRI, selanjutnya menjadi Asisten Operasi KSAD. (lam/rus)

Korban Kebakaran Menangis di Gedung DPRD KMUP

—FDTs Sampaikan Memorandum

Ujung Pandang, (PIR). H. Mahyuddin (33), warga waraga yang ditimpa musibah kebakaran di Kelurahan Bara Baraya Utara Ujung Pandang, Sabtu kemarin menaruh keteguhan dalam dialog dengan DPRD Kotamadya Ujung Pandang. Ia tidak mampu menahan duka dan keprihatinan 275 warga yang semua harta benda mereka ludes dalam kebakaran Senin lalu, sementara Pemda Kotamadya Ujung Pandang memberi batas waktu 8 Agustus 1994 mengosongkan lokasi tersebut.

Dengan menahan air mata menetes di mejawaki rakyat itu, Mahyuddin tak sanggup melanjutkan kata-katanya, setelah suaranya tercedat sendat memohon perhatian pemerintah.

Empat wakil korban kebakaran Bara Baraya ini menyertai sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah bergabung dalam Front Demonstrasi Tuntutan Selaikaka (FDTs) menyampaikan memorandum tentang musibah kebakaran tersebut kepada DPRD Kotamadya Ujung Pandang (KMUP). Mereka diterima Ketua DPRD KMUP, H.M. Yahya Patu didampingi Wakil Ketua H. Hasan Saleh, serta H. Mahyuddin mengungkapkan, biasanya kalau ada musibah kebakaran, cepat dibuka dapur umum dan posko pelayanan. Tetapi, hartanya rumah dan harta benda di kelurahan itu sampai 24 jam belum ada bantuan. Adakan kecuai posko pada bantuan Sampala. Ia mengatakan Pemda KMUP lebih cepat membangun rumah daripada membangun rumah kembali serta tanah Pemda daripada bantuan.

"Makanya atas nama warga yang berduka, saya bermohon kepada pemerintah untuk memperhatikan kami..." ungkap H. Mahyuddin tak bisa melanjutkan kata-katanya ketika air matanya menetes.

mengungkapkan, punggungan ke-kecuaian yang menyedihkan di rumah dari 60 KK ini belum terentaskan dan kepedulian pemerintah dan kepedulian masyarakat. Sampai kapan bantuan FDTs dan para penduduk yang ditimpa musibah, para warga belum mengetahui akan dikembalikan setelah batas waktu ditentukan Pemda KMUP.

FDTs lewat memorandum itu mendesak Pemda KMUP bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendirikan dapur umum, tenda darurat, fasilitas penangan air bersih dan makanan untukukupnya, sambil menarikan lokasi milik Pemda yang belum dipergunakan.

Seperti diberitakan "PR" 23, 4, 6 Agustus 1994, rencana semula Kandag Sosial KMUP, PMI Cabang Ujung Pandang, dan pemerintah setempat mendirikan dapur umum. Namun, menurut Lurah Bara Baraya Utara, N. Haruddin A. Lery dan Camat Makassar, A. Suradman S., rencana membuka dapur umum dibatalkan sesuai anjuran Pemda KMUP dengan alasan menghindari para warga membangun kembali. Bersamaan dengan itu beredar Surat Edaran Nomor 1503/IV/1994 dari Tripika Kecamatan Makassar agar para warga yang ditimpa musibah kebakaran segera meninggalkan lokasi dengan batas waktu 8 Agustus 1994. Mereka dinilai membangun tanpa izin di tanah Pemda KMUP dan kebanyakan Perda DTS Menganggap perlakuan ini tidak manusiawi, karena warga masih dalam suasana dirundung duka, perhatian di larang membangun dari Pemda KMUP saat ini.

Lewat memorandum itu, FDTs juga mendesak Kanwil Depsos untuk mengumpulakan sejumlah keperluan seperti, selimut, pakaian pantas, dan lain-lain. Di samping mendesak OKP dan OPI mengambatkan bantuan para warga yang ditimpa musibah kebakaran hanya sebatas...

terakhir Drs. Jacobus Comar, mantan Kepala Dinas Kesehatan Ujung Pandang, mengatakan bahwa pemda KMUP yang ditimpa musibah kebakaran, "Kalau kita memutar, kita tinggalkan saja daerah tersebut. Kalau kita tinggalkan, siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengungsi Vietnam kita implus di daerah ini, apalagi warga negara sendiri. Lalu apa makna Selaikaka Pancasila?" kata Jacobus.

Belum Berakhir Menanggapi memorandum FDTs, Ketua DPRD KMUP mengatakan, dengan tidak punya wewenang langsung, justru itu belum bisa memberikan jaminan soal tuntutan masyarakat yang ditimpa musibah maupun memorandum itu, karena akan dikembalikan warga yang ditimpa musibah setelah lima hari, waktu yang diberikan Pemda KMUP yang ditimpa musibah kebakaran, "Kalau kita memutar, kita tinggalkan saja daerah tersebut. Sedangkan pengungsi Vietnam kita implus di daerah ini, apalagi warga negara sendiri. Lalu apa makna Selaikaka Pancasila?" kata Jacobus.

Belum Berakhir Menanggapi memorandum FDTs, Ketua DPRD KMUP mengatakan, dengan tidak punya wewenang langsung, justru itu belum bisa memberikan jaminan soal tuntutan masyarakat yang ditimpa musibah maupun memorandum itu, karena akan dikembalikan warga yang ditimpa musibah setelah lima hari, waktu yang diberikan Pemda KMUP yang ditimpa musibah kebakaran, "Kalau kita memutar, kita tinggalkan saja daerah tersebut. Sedangkan pengungsi Vietnam kita implus di daerah ini, apalagi warga negara sendiri. Lalu apa makna Selaikaka Pancasila?" kata Jacobus.

Belum Berakhir Menanggapi memorandum FDTs, Ketua DPRD KMUP mengatakan, dengan tidak punya wewenang langsung, justru itu belum bisa memberikan jaminan soal tuntutan masyarakat yang ditimpa musibah maupun memorandum itu, karena akan dikembalikan warga yang ditimpa musibah setelah lima hari, waktu yang diberikan Pemda KMUP yang ditimpa musibah kebakaran, "Kalau kita memutar, kita tinggalkan saja daerah tersebut. Sedangkan pengungsi Vietnam kita implus di daerah ini, apalagi warga negara sendiri. Lalu apa makna Selaikaka Pancasila?" kata Jacobus.

Pedoman Rakyat. Rabu, 28 Desember 1994 & Senin, 19 Agustus 1996.

Terbentuk Aliansi Mahasiswa Prodemokrasi di UP

Ujung Pandang, (PR). Setelah mengikuti orasi-massa di III Sengul dalam acara penutupan wawasan kebangsaan, Selasa (27/12) di Auditorium IKIP Ujung Pandang, hari ini para pemimpin lembaga mahasiswa di Ujung Pandang membentuk wadah diberi nama Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD).

Kepada "PR", Ketua Aliansi Prodemokrasi Mahasiswa (Maperwa) Unhas, Isradi Zainal merencanakan AMPD dibentuk sebagai wadah bagi mahasiswa Ujung Pandang untuk mengkritik serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. AMPD juga merupakan wadah mahasiswa Ujung Pandang dalam pendirian perguruan tinggi menengah di kota ini, mengawasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan memperjuangkan AMPD adalah wadah alternatif mahasiswa dan tidak memandang status.

Pembentukan wadah kerja sama antarperguruan tinggi di Ujung Pandang ini diandatangani masing-masing, Isradi Zainal dari Maperwa Unhas, Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SXPT) Universitas "45", Usman Abdallah, Ketua SMPT IAIN

Alauddin, A. Faisal Jollong, Ketua SMPT IKIP Ujung Pandang, A. Suriadi, Ketua SMPT STIE-YPUP, Abdul Aziz P., Ketua SM Syarif UMI, Amiruddin Zakariah. Di samping itu didukung pers mahasiswa yang ikut menandatangani aliansi itu masing-masing, A. Wahyuddin Jalil dari SKK "Identitas" Unhas, dan Muhramal Azis dari SKK "Profesi" IKIP Ujung Pandang, serta M. Zainal Arifin, seorang mantan Ketua HMI Cabang Ujung Pandang.

Menurut Isradi, wadah ini akan melaksanakan diskusi membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tujuan pembentukan AMPD. Kegiatan diskusi diadakan secara rutin sekali seminggu bergilir di setiap kampus. Hasil diskusi itu akan menjadi input dalam pembangunan khususnya pembangunan HAM dan demokrasi.

Mengawak kepiatan AMPD, Selasa malam telah dilaksanakan diskusi di Unhas. Hasil diskusi tersebut, jelas Isradi, antara lain menyimpulkan, format demokrasi Orde Baru telah sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dalam penerapannya masih banyak menyimpang. Namun demikian, dalam tahun-tahun mendatang keter-

bukaan mestinya lebih dituju, bukan lagi sesuai perkembangan zaman.

Pengekanan politis, kata Isradi, pada isu keterbukaan akan semakin menimbulkan kerawanan politis. Selama 25 tahun perjalanan Orde Baru, telah berupaya membangun bangsa Indonesia seperti dicita-citakan. Namun, bila keberhasilan itu justru menjadi bumerang kalau tidak diikuti dengan keberhasilan demokrasi. Salah satu kuncinya adalah keterbukaan.

Dalam dialog tersebut juga mempersejalkan otonomi kampus. Menurut AMPD, pemberian istilah otonomi kampus akhirnya menciptakan korup dan mengancam kampus seolah-olah sebagai basis politis praktis. Menurut AMPD meskipun tidak diintegrasikan dengan "otonomi", kampus sudah merupakan sebuah dunia akademik yang memiliki otonomi.

Karena punya otonomi khas sebagai masyarakat akademis-intelektual, kampus mestinya bebas dari campur tangan politis, agar bisa berperan maksimal sesuai eksistensinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. (mu/s*)

Pagi Ini, Agum Gantikan Sulatin

Ujung Pandang, (PR).— Jabatan Pangdam VII/Wrb menurut rencana pagi ini, Senin (19-8) akan diserahkan terimakan dari pejabat lama Mayjen TNI Sulatin kepada penggantinya, Mayjen TNI Agum Gumelar dan akan bertindak selaku Irup Kasad Jenderal TNI R. Hartono.

Mayjen TNI Sulatin yang menjabat Panglima di Kodam VII/Wrb selama 17 bulan, lima hari itu (13 Maret 96 - 19 Agustus 96) akan mendapat tugas baru di Mabes TNI AD di Jakarta, sedmngkan Mayjen TNI Agum Gumelar sebelum dipercaya pimpunan TNI AD untuk menduduki jabatan sebagai orang pertama di Kodam VII/Wrb adalah Staf Ahli Pangab bidang Polkam.

Mayjen TNI Agum Gumelar, laki-laki kelahiran Tasik Malaya, 17 Desember 1945 itu, setelah tamat SMA tahun 1964, memasuki Akademi Militer Nasional dan se-

lesai pada tahun 1968 dengan pangkat Letnan Dua.

Pendidikan Militer yang diikuti oleh Jenderal berbintang dua itu antara lain Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Sesko) tahun 1985, Sekolah Staf Komando Gabungan ABRI (Sesko ABRI) tahun 1991 dan Lembaga Pelatihan Nasional (Lemhanas) tahun 1995. Jabatan yang pernah dipegang dalam karier militernya antara lain, Satgas Intel Kopkamtib Karolai, Sops Kopassandha, Danki 5 Grup 4 Kopassandha, Wadan Grup 4 Kopassus, Wansintel, Kopassus, Asintel Dan Kopassus dan Asintel Kodam V/Jaya. Pada tahun 1992 Mayjen TNI Agum Gumelar dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Korem-043 Kodam II/Serwijaya, dan pada tahun 1993 ditarik untuk menduduki jabatan sebagai Direktur "A" BAIS ABRI sebelum diangkat

sebagai Komandan Kopassus. Setelah menjabat sebagai Komandan pasukan Barak Merah pada tahun 1994 Agum Gumelar dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Brigadir Jenderal, sebelum menduduki jabatan sebagai Staf ahli Pangab bidang Polkam dengan pangkat Mayor Jenderal.

Jenderal yang menguasai bahasa Inggris dan Cina ini memiliki beberapa Linda Jasa dari negara berupa Salya Lencana Kesetiaan VIII tahun Salya Lencana GCM VIII Dharma Bela Salya Lencana Sejahtera dan Salya Lencana Paragad GEMSAKLSA mentran operasi militer yang dikendalikan oleh perwira perwira INERSY Paragad, operasi Sejahtera Timor Timur dan Operasi di Irian Jaya.

Dari perkwinan dengan Linda Amalia Susanto, Mayjen TNI Agum Gumelar dikarunia dua orang anak. (aw).



Pedoman Rakyat. Sabtu, 31 Desember 1994 & Fajar. Selasa, 13 Agustus 1996.

Pernyataan Awal Tahun Dema-AMPD UP: **Pembredelan Pers Supaya Tidak Terulang Lagi**

Ujung Pandang, (PR) Dewan Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (Dema-AMPD) Ujung Pandang, dalam pernyataan awal tahunnya dicetuskan 31 Desember 1994, antara lain menegaskan, pembredelan pers yang dilakukan memudak oleh pemerintah terhadap tiga media cetak di tanah air tahun 1994 diharapkan tidak terulang lagi di tahun 1995 dan masa datang.

Menurut Dema-AMPD yang merumuskan pernyataan awal tahun setelah melakukan diskusi dengan Forum Kajian Strategis (FKS) Karaeng Pattingaloeang Unhas ini menyimpulkan, pembredelan merupakan upaya memutuskan sarana informasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pencabutan SIUPP sebuah media tanpa diadili terlebih dahulu bertentangan dengan azas negara hukum. Cara demikian, menurut Dema-AMPD, terkesan sebagai simbol keangkuhan dan kesewenangan yang mengakibatkan kerugian banyak pihak.

Disamping diharapkan pencabutan SIUPP media massa secara sepihak tidak terulang lagi, lewat pernyataan awal tahun itu, Dema-AMPD juga menghimbau kepada pemerintah agar tidak lagi melakukan pencabutan terhadap tokoh-tokoh kritis yang dinilai vokal untuk berbicara di kampus, karena kampus memiliki otonomi keilmuan. Selain itu tindakan pengecakan bertentangan dengan Pasal 25 UUD 1945. Dalam pernyataan tertulis yang menetapkan delapan poin penting itu juga menyayangkan tindakan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan pemuda Timor Timur melakukan aksi yang sesungguhnya memalukan bangsanya sendiri pada saat pertemuan APEC di Jakarta.

Dema-AMPD juga menghimbau kepada pe-

merintah untuk tidak secara tergesa-gesa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sehubungan dengan itu, Dema-AMPD mengharagkan agar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua PB NU untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai membingungkan umat.

Selain itu, Dema-AMPD juga memohon kepada pihak keamanan untuk tidak melakukan main hakim sendiri pada saat bertugas. Hal seperti itu, menurut Dema-AMPD, masih sering terjadi misalnya saat menjalankan tugas pengurusan atau pengusutan sebuah kasus.

Bagian lain dalam pernyataan awal tahun ini, Dema-AMPD juga menghimbau kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menindak oknum pejabat yang dianggap mengasir rakyat dari kawasan pariwisata Bira dengan dalih kepentingan umum dan pariwisata, tetapi disinyalir ada kepentingan pribadi.

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Universitas Hasanuddin, Isradi Zainal dalam keterangannya kepada "PR" menjelaskan, Dema-AMPD yang dibentuk 27 Desember 1994 oleh sejumlah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di Ujung Pandang ini, dalam menjalankan kegiatannya akan bermitra dengan FKS Karaeng Pattingaloeang Unhas.

Dalam menangani sebuah masalah, Dema-AMPD mengambil peran di lapangan berupa pengumpulan data, sedangkan kajian terhadap masalah tersebut ditangani FKS Karaeng Pattingaloeang.

Menurut Isradi, Dema-AMPD dalam waktu dekat akan mengunjungi masyarakat Bira, Kabupaten Bulukumba yang punya masalah pembebasan tanah untuk kawasan wisata. (mu/la/s*)

(ant/fm)

AMPD Akhirnya Dilarang - Ditsospol Juga Larang YPKS dan YAS

Ujungpandang, Fajar

Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) akhirnya dilarang keberadaannya di daerah ini oleh Direktorat Sospol Pemda Tk. I Sulsel. Bersamaan dengan itu, juga dilarang dan dibatalkan keberadaan Yayasan Perkumpulan Karya Selatan (YPKS) dan Yayasan Amal Sejahtera (YAS).

Larangan ini terungkap dalam penjelasan khusus Kadit Sospol Pemda Sulsel kepada Fajar yang ditandatangani PYMT Kadit Sospol Harnadi.

Dijelaskan, dasar pertimbangan larangan ini yakni penegasan Pangdam VII Wirabuana pada rapat koordinasi Bakorstranasda Sulawesi antara lain, "Apapun bentuknya, jika suatu gejala akan mengganggu stabilitas, pasti akan ditindak".

Selain itu, juga pengarahan Dirjen Sospol 26 Juli 1996 yang antara lain menyebutkan, "Selain peningkatan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas LSM/kelompok bermasalah di daerah juga akan melaku-

kukan tindakan persuasif, preventif, secara cermat, cepat dan tepat bila ada hal-hal yang tidak semestinya dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang berlaku".

"Sehubungan dengan munculnya berbagai organisasi yang keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan segera dilakukan hal-hal, pertama secara terkoordinir dengan aparat keamanan melarang seluruh kegiatan organisasi yang tidak sah keberadaannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua mengamankan dan meningkatkan kewaspadaan, dari pengaruh ekstrim kiri bangkitnya kembali kekuatan Orde Lama (Orla).

Dalam kaitan itu, Kadit Sospol menegaskan, YPKS dicabut/dibatalan eksistensinya sebagai ormas yang terdaftar karena keberadaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8/Tahun 1995. Sebab, akte yayasan No. 308 yang dibuat di depan notaris

Bersambung ke Hal. 12 Kol. 5-6

PRD Pernah Ajak AMPd Bergabung

- Sama-sama Prodemokrasi tapi Lain Warna

Ujungpandang, Fajar

Mahasiswa yang tergabung dalam AMPd (Aliansi Mahasiswa Prodemokrasi) kemarin bereaksi keras atas munculnya tuduhan yang mengaitkan kelompok ini dengan PRD (Partai Rakyat Demokratik).

"Kami memang sama-sama prodemokrasi tetapi berlainan warna. Jadi jangan langsung disamaratakan," kata Agung Yusuf, jurubicara AMPd, kepada Fajar petang kemarin.

Ada lima pernyataan yang disampaikan

AMPd menyangkut tuduhan tersebut. Pertama, AMPd adalah kelompok diskusi independen dan prodemokrasi yang berpusat di Makassar dan samasekali tidak dibawah oleh organisasi mana pun juga.

Kedua, AMPd dilandasi semangat Tritura dan antikomunis, sehingga tuduhan yang menyatakan AMPd memiliki jaringan dengan kelompok yang oleh pemerintah dicap komunis, sangat tidak benar. Ketiga, misi dan visi AMPd sejalan dengan semua gerakan prodemokrasi di Indonesia.

Keempat, pernyataan Kapendam VII Wirabuana Letkol CKU Drs Mochtar Darise yang sudah mengidentikkan AMPd dengan PRD, bertentangan dengan pernyataan dari Mabes ABRI bahwa jaringan PRD sudah diketahui namun tidak disebutkan AMPd dalam struktur jaringan tersebut.

"Pernyataan kami yang kelima adalah AMPd siap membuktikan diri di pengadilan bahwa kami tetap independen dan bukan

(Bersambung ke Hal.12 kol 1)

Pangdam: Selama Kampanye, "Rapor" Ketiga OPP, Merah

Ujung Pandang (PR). Situasi pelaksanaan kampanye khususnya di Sulawesi Selatan sampai saat ini masih dalam batas kewajaran. Meskipun ketiga OPP banyak yang "rapornya" merah. Artinya tolok ukurnya mungkin bisa dilihat bahwa selama ini belum perlu aparat pengamanan (ABRI) langsung terjun ke lapangan, kecuali Polisi, dan ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan situasi ini dapat kita pertahankan sampai dengan selekasnya masa kampanye dan sampai pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI Agum Gumelar mengatakan hal itu, Selasa (6/5) di Baruga Sangiari, Gubernurnan UP pada rapat evaluasi kampanye putaran pertama, kedua dan ketiga yang telah dilaksanakan oleh ketiga OPP di Sulsel.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel H.Z.B. Palguna selaku Ketua PFD I Propinsi Sulawesi Selatan itu, selain dihadiri Pangdam VII/Wrb, juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel selaku Ketua Panwaslak Sulsel W.H.Yacob Rahim Saleh, SH, Kapolda Sulsel Brigjen Pol.Drs. Ali Hanafiah, Dan Lantamal IV Laksma TNI Totok MK Laksito, Wkt.Gubernur H.Darmadi CH dan Drs.H.Masnawi AS, Ketua DPRD Tkt I Sulsel H.Alim Bachri, Sekwilda Drs.H.Hakamuddin Djamal, Kadit Sospol Dick Barnadi dan Drs.H.Darwis Wahab.

Dari ketiga OPP hadir Ketua DPW PPP Sulsel H.Arsyad Pana, Ketua DPD I Golkar H.Amin Syam, Sekretaris DPD I PDI Sulsel Effendi Ismail.

Menurut Pangdam VII/Wrb, sesuai data dan hasil pemantauan, kesepakatan dari ketiga OPP yang telah ditandatangani sebelum kampanye ternyata memang sesuai perkiraan bahwa kesepakatan tinggal kesepakatan, tetapi sulit untuk dilaksanakan.

Waktu itu, suara dari ketiga OPP dalam menyampaikan kesepakatan itu berjalan sebagai biasa. Tapi nyatanya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Padahal masyarakat sangat menuntut dan mendambakan agar kesepakatan itu berjalan sebagaimana wajarnya. "Oleh karenanya mulai sekarang mari kita berfikir ke depan dengan menciptakan suasana yang memenuhi harapan masyarakat," kata Panglima.

Penyusupan Pada kesempatan tersebut, Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI Agum Gumelar juga menjelaskan soal penyusupan itu besar kemungkinan bisa terjadi apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Karena itu, Satgas dari masing-masing OPP sangat dituntut berperan, karena yang pertama tahu adanya penyusu-

pan adalah dari OPP itu sendiri. Kalau massa jumlahnya besar pada saat kampanye berlangsung, sangat sulit bagi aparat untuk bisa membedakan mana penyusup dan mana yang masuk simpatisan OPP.

Jadi, kata Pangdam sekali lagi, peran Satgas sangat penting sekali. Pada titik awal masa akan berangkat, hendaknya Satgas berfungsi mengecek apakah ada yang membawa senjata tajam atau barang-barang yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan kampanye ini. Dan, kalau OPP memang melihat ada anggota yang bukan OPP nya, bisa saja dilaporkan kepada aparat keamanan yang ada.

Menurut Pangdam VII/Wirabuana, cara penyusupan itu ada dua, penyusupan secara fisik dan penyusupan non fisik. Penyusupan secara fisik artinya manusia-manusia di luar OPP itu memang menjadi OPP yang berkampanye. Sebetulnya, kata Pangdam, penyusupan secara fisik ini lebih mudah dideteksi oleh OPP itu sendiri karena pihak OPP-lah yang mengenal anggota-anggotanya, apalagi Satgasnya.

Sedang yang dimaksud dengan penyusupan non fisik, adalah penyusupan pemikiran — pemikiran dalam hal yang ekstrim. Misalnya, ada massa yang mempunyai pemikiran yang merusak. Dalam penyusupan pemikiran ekstrim ini biasanya memanfaatkan kondisi massa yang mayoritas adalah generasi muda (anak muda) yang dalam segi emosi lebih labil.

"Jadi cara penyusupan ini jangan sampai dijadikan dalih oleh OPP untuk selalu mengatakan bahwa itu bukan anggotanya. Syukur-syukur kalau para penyusup itu bisa dibuktikan aparat sehingga bisa diambil langkah untuk ditindak" kata Pangdam Agum Gumelar.

Harus Diproses Lebih jauh dijelaskan dalam (Bersambung ke Hal.10 Kol.8-9)

adis Periang

tanggal 7 Maret 1997. Pukul 01.45 waktu Singapura (sama dengan waktu Indonesia Tengah), pesawat Singapore Airs dengan nomor penerbangan SQ 978 terbangkan kami menuju Kota Persewaan Hiroshima. Kami akan menjadi kota yang pernah jadi abu pada tanggal 6 Agustus 1945 akibat "Little Boy" tipe bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima.

Pukul 06.40 waktu Hiroshima (sama dengan Waktu Indonesia Timur), setelah terbang enam jam, kami pun mendarat di bandara Hiroshima. Saat itu cuaca cerah dengan suhu yang cukup dingin menuju

Bersambung ke Hal.10 Kol.6-9)

Listrik Padam, Massa PPP Amuk Kantor PLN



Ujung Pandang, (PR). Kampanye rapat umum terbuka yang digelar PPP di Lapangan Tamalate, Kamis (1/5), berlangsung rusuh. Kantor PT PLN Wilayah VIII yang berseberangan dengan lokasi kampanye jadi sasaran amuk massa lantaran listrik tiba-tiba padam saat kampanye yang dimulai pukul 14.30 Wita baru berlangsung sekitar 20 menit, menampilkan jurkam daerah, Drs. Ratnawati Arus, jurkam kedua Drs Wahid Ismail, baru memasuki prolog materi kampanye, tiba-tiba listrik padam. Jurkamus H.Ali Hardi Klodomak, SH belum tampil di atas podium.

Listrik padam sekitar pukul 14.40 Wita, saat Wahid Ismail yang juga Wakil Sekretaris DPW PPP Sulsel ini sedang menyampaikan pesan-pesannya. Akibatnya, massa yang semula terlihat asyik mengikuti jalannya kampanye, sambil meneriakkan yel-yel "hidup P-tiga", langsung bergerak mendekati kantor PLN yang berdiri megah di seberang jalanan.

Melihat pergerakan massa yang mulai beringas, satgas PPP yang terjun mengamankan jalannya kampanye langsung bertindak sigap, membentuk pagar betis menghalangi massa yang hendak masuk ke halaman kantor PLN. Namun massa yang sudah terpancing emosi tak bisa lagi dikendalikan. Mereka dengan cepat menyerbu kantor PLN yang berlatar

berlangsung sekitar 15 menit berkat kesigapan satgas PPP yang dengan susah paya mengiring kembali massa masuk lapangan. Disusul tindakan tepat pihak penyelenggara yang langsung membubarkan massa.

Demikian pula petugas keamanan yang bersikap simpatik tidak memberi reaksi berlebihan terhadap aksi massa. Mereka hanya terlihat memperketat penjagaan menghalangi massa yang hendak mendekati ke kantor PLN.

Kerusuhan yang dipicu padamnya listrik tersebut terasa sangat ganjil karena justru terjadi setelah Pangdam VII Wirahadikusumah Mayjen TNI Agum Gumelar bersama Kapolda Sulael Brigjen Pol Drs Ali Hanafiah yang hadir meninjau

jalannya kampanye PPP barusaja meninggalkan lokasi.

Berpawai Tidak berkelanjutannya aksi rusuh di arena kampanye PPP kemarin juga dipengaruhi animo massa yang ingin segera melakukan pawai kendaraan berkeliling kota seperti yang dilakukan massa OPP lain pada putaran kampanye sebelumnya. Itu terlihat jelas ketika pihak penyelenggara menghentikan kegiatan kampanye, massa secara spontan langsung membentuk iring-iringan kendaraan berpawai menelusuri sejumlah ruas jalan di Ujung Pandang.

Massa meninggalkan arena kampanye di Jalan Hertasning sekitar pukul 15.00 Wita, mengarah ke barat lalu berbelok ke

utara di Jalan A.P Pettarani. Selanjutnya membelok ke barat di Jalan Sungai Saddang Baru. Akibatnya, jalanan alternatif menuju ke luar kota yang memang selalu padat tersebut macet total selama kurang lebih setengah jam.

Tiba di Jalan Veteran, petugas kemudian berusaha memecah iring-iringan panjang kendaraan massa PPP. Sebagian diarahkan ke utara dan sebagian lagi ke selatan. Namun pemecahan ini tak mengurangi minat massa berpawai keliling kota. Mereka tetap melanjutkan pawai selama kurang lebih satu jam sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing.

Selain memecah iring-iringan (Bersamb. ke Hal.14 Kol.1-4)



Pemuda Sakit Jiwa Tebas Dua Korbannya

Ujung Pandang, (PR).

Diduga menderita sakit jiwa, BN (24) membantai seorang gadis cilik, Anni Mujahida (9) hingga tewas di tempat, Senin malam (15/9) sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Kumala Ujung Pandang. Sementara Noro (19) pembantu di rumah korban yang ikut terbebas parang pelaku, masih sempat diselamatkan warga setempat.

Peristiwa mengesankan itu terjadi sekitar 20 meter dari rumah korban. Ketika itu Anni yang ditemani Noro sedang berjalan kaki dan bermaksud membeli pisang molep.

Kapoltabes Ujung Pandang, Kolonel Polisi Drs.H.Moch Darus SH yang ditemui di lokasi kejadian Senin malam (15/9) mengatakan, pihak kepolisian masih menghimpun keterangan warga. Selain barang bukti berupa parang, petugas juga telah meminta keterangan empat saksi ma-

ta yang melihat langsung kejadian itu. Polisi telah memeriksa rumah pelaku yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. "Kasusnya sedang diselidiki," katanya.

Moch Darus menghimbau kepada masyarakat yang membludak di sekitar lokasi kejadian agar tidak bertindak sewenang-wenang. Warga setempat diharapkan tenang dan tidak bertindak main hakim sendiri. Sampai dinihari tadi puluhan petugas dengan peralatan lengkap masih terlihat berjaga-jaga di lokasi kejadian.

Saksi mata menyebutkan, sebelum bertemu korban, BN yang juga tinggal di sekitar Jalan Kumala Ujung Pandang sempat mengamuk dengan parang terhunus. Bagai kesetanan, BN yang bertemu dengan Anni, langsung mengayunkan parangnya ke tubuh korban. Parang telanjang itu berulang

kali diayunkan ke tubuh gadis cilik—murid Kelas IV SDN Mangkura III itu hingga terkapar berlumuran darah di pinggir aspal badan jalan.

Setelah itu, BN kembali menyerang tubuh Noro dengan parang yang digenggamnya. Tapi beruntung, sebelum bertindak lebih jauh, warga yang menyaksikan kejadian itu mencegahnya dengan menyerang menggunakan batu. Tapi walau dihujani batu, BN tidak bergerak dari tempatnya. "Pelaku bukannya menghentikan aksinya, tetapi malah terus menabas tubuh korban," kata saksi mata.

Sampai tengah malam tadi, Noro masih menjalani operasi di Rumah Sakit Bhayangkara. Sejumlah luka tebasan parang terlihat di tubuh korban. Seedangkan Anni tewas di tempat dengan luka tebasan di sek-

(Bersamb. ke Hal.15 Kol. 4-8)

Rp 17,5 Milyar, Kerugian Material Kerusuhan UP

* Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil

Ujung Pandang, (PR).

Kerusuhan yang terjadi selama tiga hari di kota metropolitan Ujung Pandang mengakibatkan kerugian material hingga Kamis kemarin diperkirakan mencapai Rp 17.534.000.000. Jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah, setelah inventarisasi secara resmi.

Kepada "PR", Kamis pagi kemarin, Walikota Ujung Pandang, H.A. Malik B. Masry mengemukakan jumlah kerugian terbesar dialami Kecamatan Wajo yakni sebesar Rp 10 miliar. Hampir sebagian besar sasaran massa adalah Kecamatan Wajo, karena dalam wilayah tersebut terdapat sebagian besar sarana toko, pusat perbelanjaan dan terutama kawasan sarana hiburan yang berada di Jl. Nusantara dan Sulawesi.

Selain Kecamatan Wajo, jumlah kerugian yang diinventarisasi setiap kecamatan masing-masing, Kecamatan Makassar Rp 796.000.000, Kecamatan Bontolea Rp 530.000.000, Kecamatan Tamalate Rp 500.000.000, Kecamatan Ujung Tanah Rp 250.000.000, Kecamatan Marisi Rp 250.000.000, Kecamatan Tallo Rp 115.000.000, Kecamatan Panakukang Rp 110.000.000, dan

Kecamatan Mamajang Rp 115.000.000.

Sedangkan pengrusakan dan pembakaran tercatat 1.421 rumah dan toko (ruko), 25 di antaranya ludes dibakar massa. Sedangkan sarana hiburan berupa bar, massage, kiosk-karaoke tercatat 40 dirusak massa dan sedikitnya 13 ludes terbakar. Di antaranya, Manhattan, M-Club Diskotik, Jet Set, Blue Ocean, Paradise Karaoke, Lips Karaoke, Rimadona, Galaksi, Virgo Bagus, Romantika, Makassar Pub, Madonna, Top 9, Nong Nong Karaoke, dan Leo Karaoke.

Selain itu, 67 kendaraan roda empat dirusak, dan sepuluh buah di antaranya dibakar. Sedangkan 100 kendaraan roda dua hangus dibakar massa dan 50 buah dirusak.

Korban jiwa sampai kemarin masih tercatat empat orang yakni Ani Mujahidah Rasimah (9) tewas

dibantai Benny (24), pemuda sakit jiwa, Senin malam yang merampok pemacu dari kerusuhan massa di Ujung Pandang. Menyusul Benny, sang pembantai, yang tewas Selasa siang di rumah sakit, hampir bersamaan dengan Lie Hong Seng (73) yang tewas akibat terkepung api di kediamannya Jl. Sulawesi.

Sedangkan korban lain adalah Drs. Sangkala (46), pegawai Dikbud, ditemukan mayatnya oleh para pemulung sedang tertelungkup di puing-puing kursi sofa sarana hiburan Makassar Pub yang juga habis terbakar. Sementara itu, meski seluruh toko tertutup akibat kerusuhan massa yang menimpa kota Ujung Pandang, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula, terigu, cabe, tomat tetap stabil.

Harga telur bahkan mengalami penurunan dari Rp 200 per butir menjadi Rp 160 per butir sementara minyak goreng sedikit mengalami kenaikan karena kurangnya pasokan kepada pedagang.

Ini terungkap dalam peninjauan Gubernur Sulsel H.Z.B Palaguna ke beberapa pasar di Ujung Pandang. Gubernur Palaguna dalam peninjauan itu didampingi Ketua (Bersambung ke Hal. 15 Kol. 7-9)

ABRI Sudah Memperlihatkan Sikap Profesional

Ujung Pandang, (PR). Jajaran ABRI yang diterjunkan mengamankan kerusuhan di Ujung Pandang dinilai sudah mulai memperlihatkan sikap profesional dengan mengembangkan pendekatan persuasif. Tidak lagi menghadapi massa perusuh sebagai musuh yang harus dikalahkan dan dimusnahkan, seperti dilakukan ketika mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan tarif angkutan kota di Ujung Pandang beberapa waktu lalu.

"Apa yang diperlihatkan aparat keamanan dalam menangani kerusuhan dalam dua dua hari terakhir ini Ujung Pandang harus diakui sebagai suatu kemajuan yang patut mendapat dukungan dari semua pihak," demikian tanggapan advokat senior Andi Rudyanto Asapa SH kepada wartawan yang menemuinya di Ujung Pandang siang kemarin.

Dia berharap, tindakan profesional aparat keamanan tersebut tidak saja terlihat di lapangan saat mereka terjun mengendalikan massa yang terlibat aksi kerusuhan. Tapi hendaknya secara konsisten dipertahankan sampai pada tingkat pemrosesan para tersangka pelaku aksi kerusuhan.

"Sebagai praktisi, saya sangat setuju para pelaku kerusuhan yang melakukan tindakan kriminal diproses menurut hukum dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Namun dalam melakukan proses verbal, terutama di tingkat penyidikan atau selama tersangka menjalani penahanan, hendaknya petugas tidak melakukan aksi kekerasan," harap Rudyanto Asapa.

Pengacara senior yang dua periode memimpin LBH Ujung Pandang tersebut mengaku merasa berkewajiban untuk meminta aparat secara konsisten menghindari aksi kekerasan karena pendekatan seperti itu sangat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

"Apa pun alasannya, sepanjang namanya tindakan kekerasan apalagi dilakukan aparat keamanan, jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, dan itu harus dihindari," ujarnya.

Hati-hati

Di sisi lain Rudyanto Asapa meminta jajaran pemerintah daerah dapat secara arif dan hati-hati dalam mempertimbangkan segala aspek sebelum menempuh kebijakan berkaitan dengan penanganan kerusuhan yang ter-

jadi di Ujung Pandang sejak Senin (15/9) malam.

Soalnya luapan emosi massa yang dilampiaskan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran harta benda milik warga keturunan tersebut terjadi sebagai akibat dari akumulasi sosial dan ekonomi yang sudah sejak lama menjadi "penyakit" di tengah-tengah masyarakat.

"Kematian bodah berusia sembilan tahun di tangan pemuda yang kemudian diidentifikasi mengidap kelainan jiwa sebenarnya hanya meruakan pemicu luapan emosi massa yang memang sudah sejak lama terbendung. Karena itu pemerintah harus sangat berhati-hati menanggapi. Jika pemerintah salah menanggapi bisa-bisa akan semakin parah. Ujung-ujungnya tentu rakyat banyak juga yang menjadi korban. Tentu kita tidak hal itu inginkan terjadi," tandas Rudyanto.

Dia tidak menyebutkan secara kongkret langkah apa yang paling tepat ditempuh agar kejadian yang sangat merugikan semua pihak tersebut cepat tertanggulangi dan tidak terulangi kembali. "Yang pasti akar permasalahan yang sebenarnya tak boleh diabaikan atau ditutup-tutupi," tandasnya.

Ekonomi Ujung Pandang Belum Stabil

* Walikota Buka Pameran Pembangunan

Ujung Pandang, (PR). Walikota Ujung Pandang, H.A. Malik B. Masry menyatakan, akibat kerusakan saat ini kegiatan ekonomi di Ujung Pandang belum stabil. Para pedagang atau pemilik toko masih dihantui ketakutan, jika tragedi kerusakan 15-16 September lalu terulang lagi setiap saat. Karenanya, walikota mengimbau kepada masyarakat Ujung Pandang agar benar-benar menyadari akibat dari peristiwa kerusakan itu.

Walikota mengemukakan itu dalam sambutannya sebelum membuka Pameran Pembangunan dilaksanakan memeriahkan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu petang kemarin di Lapangan Sepak Bola Perumnas, Tamalate. Pameran yang berlangsung lima

hari itu diikuti semua instansi dalam wilayah KMUP.

Menurut Ketua Panitia Pelaksanaan, Kakandeppen KMUP, Drs. Muhammad Amiruddin, pameran yang diikuti sekitar 76 stand berbagai instansi tersebut dilaksanakan secara rutin, sete-

lah tahun lalu dilaksanakan di Lapangan Kompleks Panakukang Mas.

Walikota dalam sambutannya juga mengajak semua unsur terkait untuk merenungi tragedi kerusakan Ujung Pandang. Malik menyatakan, kejadian itu hanya berlangsung dua hari, tetapi mengorbankan sebagian hasil pembangunan yang telah dibangun bertahun-tahun.

Karena Malik kembali mengimbau kepada masyarakat agar menyadari dan memahami isu-isu yang bisa membuat korban materi dan jiwa manusia. Walikota kembali menjelaskan kejadian tersebut bukan karena orang Cina membunuh orang Makassar, tetapi seorang pemuda mengidap penyakit jiwa yang

membunuh seorang anak tak berdosa.

Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut, untuk kembali membangun dan membenahi kerusakan yang terjadi akibat kerusakan. Ia juga meminta warga Ujung Pandang agar tidak mudah terpancing dengan isu yang ingin memecah belah persatuan dan mengorbankan hasil pembangunan.

Usai membuka pameran itu, walikota dan Ketua Dharma Wanita dan Tim Penggerak KMUP, Ny. Rahina Malik meninjau stand-stand. Dari 76 stand itu menampilkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. (mu-pa/la/s).

tu Czi Aldi Rinaldi.

Pangdam VII/Wrb: Waspadai Isu yang Berkembang di Masyarakat

Ujung Pandang, (PR).

Memasuki tahun baru 1998, kita masih dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memprihatinkan, karena terjadinya adanya gejolak moneter yang melanda hampir seluruh dunia. Gejolak ini membawa dampak yang begitu luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Demikian dikemukakan Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agum Gumelar pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-32 Batalyon Zeni Tempur 8/SMG di lapangan upacara Makoyon Zepur 8/SMG, Rabu (7/1). Hadir pada upacara tersebut Dan Yon Zepur 8/SMG, Letkol Czi Soepeno, para perwira staf, komandan satuan dan kepala dinas jawatan Kodam VII/Wrb serta undangan lainnya.

Dalam situasi dan kondisi demikian, lanjut Panglima, masyarakat akan sangat mudah terbawa isu-isu dan hasutan dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Panglima minta seluruh anggota Yon Zepur 8, agar betul-betul waspada terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat dan menghadapi keadaan yang memprihatinkan itu dengan optimisme serta

tetap berpegang pada jati diri prajurit ABRI dengan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Panglima juga mengingatkan bahwa situasi dan kondisi sekarang telah berubah dengan cepatnya sebagai konsekuensi kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Untuk itu kita semua harus pandai-pandai dalam menyikapi keadaan yang sedang berubah ini agar tidak terbawa hanyut oleh isu-isu dan pengaruh yang memecah belah bangsa. Ia kemudian minta seluruh prajurit Kodam VII/Wrb harus solid dalam situasi apapun. "ABRI yang solid adalah ABRI yang memiliki profesionalisme yang handal, disegani dan dicintai oleh rakyat. Dengan demikian maka keberadaan ABRI akan diterima di hati rakyat dan selalu menjadi dambaan serta kebanggaan rakyat," kata Panglima Agum Gumelar.

Dalam bagian lain sambutannya, Panglima mengingatkan bahwa dalam waktu tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan sidang umum MPR 1998. Menjelang sidang umum MPR ini suhu politik terasa semakin meningkat. Hal ini menunjukkan adanya dinamika masyarakat yang se-

Harga Sembako Melambung, Pembelian Dibatas

Ujung Pandang, (PR).

Aksi borong yang dilakukan sebagian anggota masyarakat Ujung Pandang terhadap kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) karena takut kehabisan menyebabkan harga sejumlah barang merambat naik. Bahkan, harga susu melambung di atas 100 persen, sedangkan mie instan naik sekitar 60 persen. Itu belum termasuk bahan kebutuhan lain yang juga turut naik.

Pemantauan "PR" di beberapa swalayan kemarin menunjukkan, harga susu bubuk bendera ukuran dua kilogram dijual tajam dan dijual antara Rp 78.000 hingga Rp 83.000 per kaleng.

Di Duta Mall Jalan Cenderawasih misalnya, susu bubuk bendera ukuran dua kilogram dijual pada tingkat harga Rp 73.500 perkaleng, ukuran satu kilogram dipasarkan seharga Rp 39.300 per kaleng, sedangkan untuk ukuran setengah kilogram Rp 18.300.

Salah seorang pelayan di toko

yang terletak di depan Asrama Mattoanging itu mengatakan, kenaikan harga susu itu baru terjadi tadi (Senin, 9-2, Red), setelah masuk pasokan baru dari distributor.

Naiknya harga susu ini menyebabkan produk tersebut menjadi langka di pasaran. Bahkan, di Toko Gudang Rabat Alfa dan Pusat Perkulakan Goro sudah tidak ditemukan lagi susu ukuran dua dan satu kilogram sejak kemarin siang.

Asisten Manajer Toko Gudang Rabat Alfa, Sutadji, menjelaskan, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya melakukan penajahan barang yang mulai langka, seperti susu, minyak goreng dan mie instan.

Toko Alfa yang baru mulai buka kemarin, langsung "dicerbu" pengunjung, sehingga manajemen toko yang terletak di Kawasan Pengungkung Mas itu cepat tutup. Pengunjung yang datang belakng masuk secara bertahap melalui pintu samping.

Menurut Sutadji, agar masyarakat tidak meniborong barang—khususnya susu, minyak goreng dan mie instan—pihaknya terpaksa melakukan penajahan. Untuk susu misalnya, setiap pengunjung hanya dibolehkan membeli maksimal dua kilogram.

Dikatakan, pihaknya sulit mempertahankan harga lama, karena distributor sudah memberlakukan

harga baru.

Susu misalnya, ketika toko baru dibuka, masih dijual pada hari lama, namun setelah distributur memasokkan barang pada pukul 14.00 Wita, harganya sudah naik. Kami pun terpaksa menaikkan.

Kendati mengakui telah menaikkan harga beberapa barang yang memang banyak dikonsumsi masyarakat, Sutadji mengatakan masyarakat tidak perlu panik, karena barang yang naik harganya, hanya pasokan baru, sedangkan stok lama tetap diberlakukan harga lama.

Sebagai contoh, distributur sudah menginformasikan, harga mie instan sudah naik sekitar 60 persen dari harga semula, namun pihaknya belum menaikkan harga sebab barang yang ada di gudang masih merupakan dibeli dengan harga lama sehingga belum bisa menaikkan.

Pembatasan penjualan dilakukan juga Pusat Perkulakan Goro di Swalayan Sejahtera yang terletak di Makassar Mall. Untuk pembelian mie instan di Swalayan Sejahtera, setiap pengunjung hanya dibolehkan membeli maksimal enam bungkus, dan minyak goreng hanya boleh satu kilogram untuk setiap pengunjung.

Kini penajahan penjualan barang yang dilakukan beberapa toko (Bersemb. ke Hal. 11 Kol. 3)

ian Jelas

Mahasiswa Desak Pemda Tutup Alfa

Ujung Pandang, (PR). Puluhan mahasiswa, Selasa kemarin, melakukan unjukrasa mendesak pihak berwenang termasuk Pemda Kotamadya Ujung Pandang agar menutup gudang rabat 'Alfa' karena dinilai dengan sengaja melakukan spekulasi penimbunan barang dalam krisis ekonomi saat ini.

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Tallangpang itu, bahkan memberi ultimatum batas waktu 24 jam kepada Pemda KMUP agar secepatnya menyelesaikan kasus tersebut, dan jika terbukti, harus menutup sarana perbelanjaan di kawasan Panakkukang Mas itu.

Di Pusat perbelanjaan Gudang Rabat Alfa, aksi unjuk rasa diprakarsa kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (Ka AMPI) Makassar.

Aksi unjuk rasa ini sempat membuat sejumlah toko di kota ini terpaksa tutup, misalnya di pusat perdagangan emas Jalan Setelak Opu. Di tempat itu hanya beberapa toko yang dibuka. Begitu pula di beberapa tempat lainnya, tampak pemilik toko waspada.

Mereka lebih memilih menutup toko daripada menjual seperti biasa. Aksi tutup toko ini juga berlangsung di beberapa tempat.

Dalam aksi menyikapi kenaikan harga di Kantor Walikota Ujung Pandang, Ka AMPI mengungkapkan, pihak Alfa patut diruga keras telah melakukan tindakan spekulasi penimbunan barang, serta men-

jual barang stok lama dengan harga baru, sesuai bukti yang ditemukan Gubernur Sulsel dalam peninjauan ke beberapa pusat penjualan sembilan bahan pokok (sembako) beberapa waktu lalu.

Dalam isi memorandum itu juga diungkapkan bukti-bukti, baik ditemukan oleh Tim Pemantau Sembako Sulsel, dan temuan pihak mahasiswa bahwa pihak Alfa disurvei sengaja membuat kolusi dengan pihak distributor, dengan menutup sarana perbelanjaan itu selama 10 hari dengan alasan libur midik, kemudian membuka kembali 9 Februari, bertepatan melambungnya harga sejumlah bahan pokok.

Sedangkan barang-barang stok lama yang ditambah itu dijual dengan harga baru hampir menyamai naiknya harga baru stok baru. Menurut para mahasiswa, masyarakat membeli Alfa itu tidak sadar telah ditipu pihak Alfa yakni barang stok lama tetapi dikenakan harga cukup tinggi.

Dalam memorandum ditegaskan, tindakan itu selain anomalis, juga sudah tergolong subversif karena menciptakan keresahan masyarakat yang

akan memicu gejolak menganggu Kambtibmas. Karenanya, jika pihak berwenang segera menutup usaha tersebut, atau pihak Alfa harus berpindah dari Sulsel mencari tempat lain, karena menurut para mahasiswa, bumi Sulawesi Selatan mengharuskan pengusaha yang merugikan rakyat dan nasionalis.

Sebelum dicabut izin operasinya, pihak mahasiswa meminta Pemda agar mendesak pihak Alfa membayar honor libur selama 10 hari yang belum dibayar.

Sama seperti Ka AMPI, aksi serupa juga digelar di DPRD Tlel I Sulsel, dilakukan sekitar ratusan mahasiswa IAIN Alauddin. Mereka datang ke gedung wakil rakyat dengan berjalan kaki.

Di DPRD Sulsel, rombongan diterima di ruang rapat Fraksi Karya Pembangunan oleh Ketua DPRD Sulsel, H.M. Amin Syam didampingi Drs H.A. Binrang Makhuau serta Arip Padandang.

Kepada anggota dewan, Ketua Senat Mahasiswa Institut (SMI) IAIN Alauddin, Djufri meminta agar ada upaya serius mengantisipasi kondisi yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan harga sembako dan bahan pokok (sembako).

Mereka juga meminta agar diberlakukan patokan harga dan label harga pada barang yang akan dijual. Namun menurut Amin Syam, pencantuman label sering mengalami kesulitan

karena setiap saat harga bisa berubah.

Patokan harga, kata Amin Syam memang bisa saja ditetapkan. Hanya saja ada kelemahan. Bahkan bisa menimbulkan kerawanan. Misalnya, jika disimpulkan patokan harga, tapi kemudian ditemukan bahwa harga tersebut tidak sesuai, tentu saja bisa menimbulkan kerawanan.

Berdasar itu, lanjut Amin, pihaknya bersama instansi terkait akan berupaya semaksimal mungkin memenuh tuntutan mahasiswa berkaitan dengan upaya pengendalian harga.

Dukung Di Kantor Walikota Ujung Pandang, para mahasiswa diterima Wakil Walikota, H. Syamsul Ridjal, S.H. didampingi antara lain Asisten I, Drs. H. Syahrudin Gansing, Asisten II, Drs. H.M. Nurdin B., Asisten III, Drs. Supomo Guntur, Kakanasep, Letkol Kav. Slamet Riyanto, Kakanawil Hansip, Letkol Andi Zainal Ibrahim, Kabag Pemerintahan Drs. Ince Adnan Mahmud.

Wawali KMUP menyatakan salut dan berterima kasih atas kepedulian mahasiswa dalam menanggapi atas kasus-kasus yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Kasusnya, Wawali menyatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa itu kepada Walikota Ujung Pandang, H.A. Malik B. Masry, yang siang kemarin tidak sempat menerima para mahasiswa karena memabawakan materi satu forum

seminar di salah satu hotel di kota ini.

Menanggapi rasa ragu mahasiswa atas memorandum mereka yang tidak disampaikan, Syamsul Ridjal dengan tegas mengatakan, sebagai aparat ia paling benci dengan kemunafikan.

"Saya duduk di sini hanya kewajiban menjadi pejabat. Kalian tahu, keluarga saya juga banyak berjualan di emper-emper toko. Selama menjadi pejabat, saya tidak pernah menafiki. Jadi tuntutan kalian ini sama dengan dengan hati nurani saya dan saya akan sampaikan kepada walikota agar segera ditindak tegas sesuai hukum. Agar menjadi contoh bagi pengusaha, bagi kita semua, bahkan bagi pejabat yang suka berleha-leha" ujar Syamsul Ridjal sambil memukul meja.

Dengan ketegasan Wawali itu, para mahasiswa tampak memahaminya dan rasa puas. Dialog diakhiri dengan tepuk tangan.

Dari gedung DPRD Sulsel di laporkan, situasi berdialog dengan Ketua DPRD Sulsel, para mahasiswa IAIN Alauddin dikejutkan dengan bus Damri. Mereka tidak langsung pulang ke kampus, tetapi beresing kota. Bus yang memuat mereka melintas di Jalan Bawakarseng, Kajalalude, Hasanuddin, Sembawa Opu, Rajawali dan selanjutnya kembali ke kampus IAIN Alauddin. Di sepanjang jalan, para mahasiswa mengeluarkan para mahasiswa mereka dari balik kaca bus Damri (hh-sp-mu-pele/s*).

Tim De

Pedoman Rakyat. Rabu 18 Februari 1998 & Kamis, 5 Maret 1998.

AMPD Sampaikan Sembilan Tuntutan ke DPRD

Ujung Pandang, (PR). Sejumlah aktivis Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) Selasa (17/2) siang menemui ketua DPRD Sulsel H.M. Amin Syam dan menyampaikan sembilan tuntutan untuk diteruskan ke Ketua DPR/MPR RI di Jakarta.

Selain mendukung Prof. Dr. H.B.J. Habibie dipilih menjadi Wapres periode 1998-2003 serta menyatakan tekad untuk menyukseskan Sidang Umum MPR RI 1998, AMPD juga mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban CSIS atas konsep-konsep pembangunan yang dihasilkannya selama Orde baru

yang kini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan telah mengancam integritas bangsa.

AMPD di hadapan Ketua DPRD Sulsel memperseorakan pula harga Sembako yang kian membung. AMPD meminta agar tim pemantauan Sembako yang dibentuk pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan belaka, melainkan harus proaktif mengkoordinasikan pengadaan bantuan riil untuk disalurkan kepada masyarakat yang terjepit beban hidup dan kekurangan pangan akibat krisis ekonomi.

Seiring dengan itu, saran AMPD, pemerintah harus segera

melakukan penetapan harga di pasaran serta menindak secara tegas oknum-oknum yang mencoba melakukan spekulasi untuk meraih keuntungan di tengah kesulitan dengan jalan menimbun barang serta melarikan uangnya ke luar negeri.

AMPD menganggap krisis ekonomi yang kini melanda bangsa Indonesia tidak terlepas dari tatanan yang diciptakan sekelompok masyarakat dengan suatu misi untuk mencapai target tertentu, yakni membangun kekuatan ekonomi yang mengarah pada sekelompok kecil masyarakat sehingga menumbuhsuburkan konglom-

erasi yang tidak memiliki rasa nasionalisme ke-Indonesiaan yang tinggi.

Tatanan perekonomian bangsa yang saat ini dalam keadaan porak-poranda tersebut harus segera diperbaiki dengan melakukan reformasi ekonomi secara konsisten, konkret dan transparan.

Menurut AMPD, upaya ini hanya bisa berjalan di bawah kendali figur pemimpin yang dapat mengatur rakyat Indonesia menuju masa depan yang cerah dengan kecerdasan teknologi yang bertumpu pada sumber daya manusia yang bermoral tinggi, kreatif dan inovatif. (e/la).

Ribuan Mahasiswa Turun Jalan

* Tuntut Pemerintahan yang Bersih

Ujung Pandang, (PR). Sekitar lima ribu mahasiswa IKIP melakukan aksi turun ke jalan dari Kampus Parangtambung ke Kampus Gunung Sari melewati Jalan Ujung Tata, Sultan Alauddin A.P. Pettarani. Aksi ini sempat memacetkan arus lalu lintas.

Selain di IKIP, aksi mimbar bebas juga digelar di Gedung DPRD Tingkat I Sulsel oleh seratusan mahasiswa Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia Makassar (FMIM) di DPRD Tkt Sulsel.

Bagitu tiba di Kampus IKIP Gunung Sari sekitar pukul 9.10. Wita itu, mereka segera menggelar mimbar bebas, membacakan beberapa tuntutan.

Para mahasiswa ini mengemas aksi dalam bentuk opera "Sidang Umum Untuk Kaisar" di halaman kampus Gunung Sari. Mereka menggiring keranda yang terbuat dari bambu, dibungkus kain putih dan bendera almanaster. Mereka juga membentangkan beberapa spanduk dan pamflet yang antara lain bertuliskan Anak Bangsa Kelaparan, U Habiskan Rp 44,5 miliar serta Kaki Butuh Sistem dan Presiden yang aru. Yang terakhir disebut adalah sanduk yang dibuat Forum Mahasiswa

Indonesia Makassar.

Dalam opera "Sidang Umum Untuk Kaisar", beberapa tokoh mahasiswa tampil membacakan beberapa tuntutan dengan gaya satire—menuntut pemerintahan yang bersih. Mereka juga mengungkapkan beberapa ketimpangan yang terjadi di negeri ini.

Dalam petisi yang dibacakan, keluaran besar mahasiswa IKIP Ujung Pandang dan Senas Mahasiswa menyerukan agar rakyat Indonesia tidak terbuai dengan krisis nasional yang menimpa republik ini dan memikirkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Berbagai kejadian, fenomena sosial, krisis moneter mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang tidak terkendali, pertanda kegagalan para penentu kebijakan. Karena itu mereka menganggap SU MPR momentum yang tepat untuk menentukan wajah republik di masa datang.

Mereka menyebutkan, sudah saatnya reformasi politik, paling tidak harus dim-

ulai dengan memblasakan memunculkan pemimpin yang jujur dan berwibawa untuk kemudian mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi selama ini.

Para mahasiswa meminta anggota DPR/MPR yang sedang bersidang agar betah-betah memilih pemimpin yang jujur, adil dan berwibawa dan tidak memilih pemimpin yang memikirkan harta, balai masa jabatan presiden, cabut lima paket undang-undang politik, fungsikan lembaga legislatif, usut kekeayaan pejabat serta berantas kolusi dan korupsi.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari sentral ke Ujung Pettarani dialihkan lewat belakang kampus.

Aparat keamanan tampak berjaga-jaga, meski jalannya mimbar bebas tetap terkendali.

Usai menggelar mimbar bebas sekitar pukul 11.30. Wita mereka diangkut kembali ke Kampus Parangtambung menggunakan empat truk dan sejumlah angkutan kota.

Sama dengan aksi di IKIP, mimbar bebas di DPRD Tkt I Sulsel sempat mengundang perhatian. Namun para mahasiswa yang tergabung dalam FMIM terpaksa membawa pulang kerenda karena

mereka tidak sempat berdialog dengan anggota dewan. Mereka hanya membacakan petisi yang sudah disiapkan.

Di lantai II Gedung DPRD Sulsel, mahasiswa sudah menyiapkan deklarasi yang mereka bacakan antara lain suksepsi pemerintahan harus terwujud dan menolak pencalonan tuoggal Soeharto sebagai Presiden RI periode 1998-2003 hapuskan 5 paket Undang-undang Politik No: 5 Tahun 1985 yang mengakhiri hak rakyat tidak memahami hak-hak politiknya.

Selain itu, mereka juga meminta sistem pemilu dari sistem proporsional tidak langsung menjadi sistem pemilu distrik secara langsung. Juga segera turunkan harga barang yang mencelkik dan tidak menentu dengan labelisasi harga.

Setelah melakukan aksi di DPRD Sulsel beberapa saat kemudian para mahasiswa itu lalu membentangkan spanduk sepanjang sekitar 25 meter. Mereka kemudian melakukan long march dengan melewati Jalan A.P. Pettarani selanjutnya singgah sejenak di Kampus IKI kemudian ke IAIN Alauddin.

Mimbar bebas dan turun ke jalan merupakan lanjutan dari aksi serupa yang dilakukan pada Senin (2/3), te fokus pada penurunan harga sembako (hh-s/la/s*).

DPRD Diblokade Panser, Kampus 'Dikepung' Petugas

* Mahasiswa hanya mimbar bebas dalam kampus

Ujung Pandang, (PR). Isu unjuk rasa mahasiswa secara besar-besaran yang akan memenuhi jalan-jalan utama, membuat pihak ABRI menurunkan sejumlah kekuatan personilnya yang dilengkapi persenjataan lengkap, panser, ditambah petugas keamanan dalam kota, Senin (11/3).

Tak ayal lagi, kantor DPRD Tkl Sulsel terpaksa diblokade kendaraan lapis baja, sedikitnya ada 10 buah panser yang diparkir siaga di halaman depan dan samping kanan kantor wakil rakyat yang beralamat di Jl. Urip Sumaharto tersebut.

Sementara suasana kampus kampus, seperti di IAIN Alauddin Ujung Pandang, UMI Ujung Pandang, Unhas dan sejumlah kampus lainnya, juga dijaga petugas keamanan dari berbagai kesatuan. Akibatnya, — karena kalah gerak, terpaksa mahasiswa menggelar aksi

mimbar bebas di dalam kampus masing-masing.

"Jangan ada yang keluar terlalu jauh dari areal kampus, sebab kita telah 'dikepung', dijaga. Jadi tolong hindari bentrokan dengan petugas, atau supaya aksi ini tetap aman dan damai, tidak terjadi ada fisik," perintah salah seorang tokoh mahasiswa UMI Ujung Pandang, menghimbau teman-temannya agar jangan terpancing satu sama lain dengan petugas keamanan.

Di IAIN Alauddin, ratusan mahasiswa berkerumun di la-

pangan upacara kampus IAIN menyelenggarakan pengurangan dari juru bicaranya. Mereka menantikan tentang perlunya reformasi ekonomi, penurunan harga kebutuhan pokok agar segera ditinjau pemerintah, tidak hanya sekedar disusutkan, dibesitikan, tapi pemerintah harus ambil langkah proaktif.

Aksi pembakaran ban mobil bebas tidak saja terjadi di dalam kampus IAIN Alauddin, juga — bahkan lebih seru, terjadi di depan kampus UMI Ujung Pandang. Ribuan mahasiswa UMI dan Univ. '45, berdesakan-desakan di sisi kanan kiri jalan, di depan kedua kampus itu untuk mengukuti acara 'ritual' yang sudah sepekan berlangsung terus.

Mahasiswa UMI mendesak pemerintah agar perlunya dilakukan reformasi segala bidang

dengan cepat, sebab katanya tidak mungkin ekonomi stabil, jika tidak didahului reformasi politik. Karena lanjutnya diinilah pangkal permasalahan yang terjadi selama ini.

Sementara di depan kampus Unhas juga memperlihatkan suasana yang serupa, pembakaran ban mobil bekas sebagai warna tersendiri dalam menggelar aksi mimbar bebasnya, turut menyita perhatian yang tidak saja kalangan mahasiswa, tapi juga masyarakat yang berduka, atau pengguna jasa jalan, sehingga kemacetan lalu lintas tak dapat dihindari.

Gelar Pasukan Perihal pengerahan personil keamanan ke sejumlah titik rawan keamanan, tempat-tempat strategis, menurut salah seorang petugas di depan Kantor DPRD Tkl Sulsel dinilai hanya semata-mata langkah penga-

manan semata, bukan unjuk menakit-nakuti massa.

"Langkah 'pengempungan' kampus dari luar ini, hanya sekedar mengantisipasi 'membubarinya' massa yang keluar dari kampus, agar jangan sampai mendatangi lagi DPRD bunut sementara waktu," jelas salah seorang anggota dewan sesuai bersidang rapat paripurna rangsangan peraturan daerah tentang RAPD Sulsel TA 1998/99.

Maka tak heran jika gelar pasukan keamanan di sepanjang sisi kanan-kiri KM 4 hingga batas kota KMUP-Maros, terlihat siaga penuh, sehingga membuat pengunjung rasa mual karena kampus masing-masing. Terlihat hanya tokoh-tokoh mahasiswa yang keluar dari sarangnya, seperti berdiri memantau di depan kantor DPRD Sulsel, sekedar memantau kondisi di luar kampus. (M/As).

Agum Gumelar : Saya Siap untuk Berdialog

Ujung Pandang, (PR). Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agum Gumelar mengungkapkan, pihaknya selalu siap untuk berdialog dengan berbagai kalangan menghadapi kondisi sekarang ini.

Hal ini diungkapkannya ketika ditanya tanggapannya mengenai kesiapan Pangab berdialog dengan para tokoh kritis dan mahasiswa. "Bagi kami selama ini kegiatan dialog dengan berbagai pihak itu sudah terjalin. Jadi kalau itu dilaksanakan, maka sebenarnya adalah lebih mengintensifkan kegiatan tersebut," ujar Pangdam kepada PR usai Shalat Jum'at di Mesjid Tarbiyah I Ujung Pandang.

Namun demikian, sebagaimana yang ditekankan oleh Pangab Jenderal. TNI Wiranto, Pang-



Agum Gumelar

dam VII meminta agar dialog tersebut harus dilaksanakan secara konstitusional, tanpa melanggar aturan yang ada.

Kesiapan pimpinan ABRI berdialog dengan para tokoh kritis seperti Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri serta para mahasiswa telah menjadi bahan berita yang menarik, baik media cetak maupun media elektronik. Namun demikian Pangab mengakui, pimpinan ABRI di daerah telah melakukannya.

Khusus di daerah Sulsel ini, kesiapan Pangdam VII Wirabuana untuk berdialog dengan berbagai pihak diharapkan akan melahirkan keamanan visi dalam memecahkan berbagai permasalahan, demi terciptanya stabilitas pasca Sidang Umum MPR 1998 yang telah berhasil menetapkan H. Muhammad Soeharto sebagai presiden dan BJ Habibie sebagai wakil presiden, periode 1998-2003.

Berbagai sumber didaerah ini mengharap, agar kegiatan dialog nanti hendaknya menghadirkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat, dan dilaksanakan sedini mungkin didalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Seperti diketahui selama pelaksanaan sidang Umum MPR di Ujung Pandang telah terjadi unjuk keprihatinan, baik men-

Dua Lagi TKI Terancam Hukum Pancung di Arab Saudi

Jakarta, (PR). Dua lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh.

Dirjen Binapenta Jack Iskandarsyah di Jakarta, Jumat, mengatakan, Dimiyati bin Us-

mengaku dari sebuah LSM membentangkan poster di lobi Depnaker dan menuntut kejelasan Kasus Dimiyati. Mereka mengatakan pada Sabtu (14/3) Dimiyati akan dihukum pancung, sementara Depnaker menyatakan kasusnya masih dalam tahapan persidangan. (Ant)

Tiga Guru Besar Unhas Ikut Aksi Mimbar Bebas

Ujung Pandang (PR). Inilah fenomena baru di Unhas. Tiga guru besar perguruan tinggi terbesar di KTI ini, masing-masing, Prof. Dr. H. Mattulada, Prof. Dr. H.A. Muis, SH dan Prof. Drs H. Burhamzah, MBA, Senin (13/4) sekitar pukul 11.00-12.00 Wita ikut bersama sekitar dua ratusan mahasiswa menggelar aksi mimbar.

Sebelum mimbar bebas, ketiga guru besar ini terlibat dalam diskusi bertema: Reformasi dalam bidang ekonomi dan politik.

Hutunya ketiga guru besar dalam aksi mimbar bebas ini sedikit meogagetkan mahasiswa yang hadir. Betapa tidak, inilah untuk pertamakalinya dosen, apalagi guru besar mau terlibat dalam aksi untuk rasa bersama mahasiswa.

Sinyal untuk ikut dalam aksi mimbar bebas ini sempat diungkapkan Prof. Burhamzah, Sabtu (11/4) ketika Akbar Erida, salah seorang aktivis mahasiswa Unhas secara berkelekar meminta Prof. Burhamzah agar mau terlibat dalam aksi-aksi mimbar bebas.

Pemintaan Akbar itu disampaikan saat berlangsung temu pakar Unhas dengan sejumlah wartawan dan korresponden berbagai media di daerah ini, di Lantai I Gedung Rektorat Unhas.

Prof. Burhamzah tidak menjawab secara spontan, namun mengucapakan Insya Allah.

Fenomena Unhas ini pun bergabung dengan mahasiswa yang sedang menggelar aksi mimbar bebas bersama sekitar dua ratusan mahasiswa.

Tamzil sebagai pembicara pertama adalah Prof. Dr. H. Mattulada. Burhamzah yang tampil sebagai pembicara terakhir, lebih menjabarkan pentingnya aksi mahasiswa sekarang.

Tamzil sebagai pembicara pertama adalah Prof. Dr. H. Mattulada. Burhamzah yang tampil sebagai pembicara terakhir, lebih menjabarkan pentingnya aksi mahasiswa sekarang. Menurut dia, mahasiswa harus memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. "Saya berdiri di sini karena ada sesuatu masalah untuk dipedulikan, yang sebenarnya tak perlu terjadi bila DPR kita berfungsi," katanya yang disambut meriah mahasiswa.

Faktor ekonomi Unhas ini, malah sempat dielu-elukan dan diminta agar bisa ikut langsung dalam aksi mahasiswa. Insya Allah, saya siap di belakang kalian," jawabnya.

Menurut pakar ekonomi Unhas ini, mahasiswa harus berani memperjuangkan hak-haknya. Tapi, selain berani, hendaknya para mahasiswa memiliki moral dan etika

yang dilaporkan hilang. Burhamzah menilai, cara-cara seperti itu tidak bisa ditoleransi, sebab itu sudah anarkisme.

"Insya Allah saya akan selalu berada di barisan kalian," janji Burhamzah.

Prof. Dr. Mattulada, dalam menjawab tantangan reformasi dewasa ini, kita hendaknya menyuarakan agar menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Mattulada menekankan perlunya paket berpikir untuk reformasi, satu di antaranya membatasi kekuasaan presiden.

Menurut guru besar Unhas ini, sudah saatnya reformasi dimulai dari ajakan kembali ke UUD 1945, terutama melaksanakan pasal 37 tentang perubahan UUD.

"Sekarang ini banyak kalangan termasuk pemerintah sendiri yang agomong, kita menjalankan UUD secara murni dan konsekuen. Saat ini kita menjalankan itu," katanya.

Namun mantan ketua Dema untuk menjalankan hal itu butuh waktu yang lama. "Kalau ini berhasil, Alhamdulillah, tapi jelas ini membutuhkan waktu," tegasnya.

Aksi tersebut berlangsung terhenti dan cukup meriah, apalagi ketika Prof. A. Muis mengemukakan orasinya.

paket reformasi. "Kalau kita ingin reformasi, cabutlah lima paket UU politik, rambak UU Pokok Pers, serta merombak UU lain, seperti UU subversif," katanya.

Kronologis Aksi
Aksi mimbar bebas ini sebenarnya dimulai ketika berlangsung diskusi tentang reformasi yang diadakan majalah Catatan Kaki UKPPM Unhas di rektorat. Saat diskusi berlangsung, di luar ruangan digelar juga aksi mimbar dengan tema yang sama. Kehadiran aksi ini, menurut panitia pelaksana, sempat memecah perhatian peserta diskusi, namun tidak membuat acara ini terhenti, malah tetap berlangsung hingga selesai.

Ketiga guru besar Unhas ini pun diduol mahasiswa agar bisa memberikan orasinya di tengah aksi mahasiswa. Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, menurut Mattulada aksi mahasiswa seperti ini merupakan salah satu upaya menuju pelaksanaan reformasi.

Salah satu agenda aksi yang kebanyakan dihadiri mahasiswa Fisip ini, yakni aksi solidaritas terhadap penghilangannya Makhul Halim salah seorang aktivis Unhas sesuai mengadakan aksi di kampus dan gedung DPRD Sulsel Kamis (9/4) lalu.

Di tengah aksi tersebut, Mat-

adalah soal biasa dalam politik.

Keterangan Kadispem
Kadispem Polda Sulsel, Mayor Pol. Drs. H.R. Bagus Santoso menanggapi berita hilangnya mahasiswa Unhas seperti yang dimuat harian ini (PR 13/4) yang mengemukakan diduga keras diciduk oleh oknum tertentu, adalah dugaan yang tidak benar. Ini berdasarkan hasil laporan yang disampaikan Kepala Kesatuan dan instansi terkait ruang lingkup Poltabes Ujungpandang.

"Demikian pula adanya berita pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, pihak kepolisian membantah hal tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian belum pernah menerima laporan dari keluarga Maqbul Halim sehubungan dengan kasus raihnya," kata Bagus Santoso.

Kadispem Polda Sulsel mengimbau kepada keluarga yang merasa kehilangan keluarga arganya agar segera melaporkan identitas yang lengkap berikut ciri-ciri/tanda-tanda istimewa serta lampiran foto yang jelas kepada kepolisian sebagai petugas dapat memisahkan data pribadi yang bersangkutan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia juga minta kepada mahasiswa agar tidak terlalu resah dalam pencarian rekannya, karena pihak kepolisian tidak akan

Aktifis Mahasiswa Unhas Hilang

*** Diduga Dicituk Usai Unjukrasa**

Ujung Pandang, (PR). Salah seorang aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, Maqbul Halim, yang juga koordinator Litbang Surat Kabar Kampus 'Identitas', dikabarkan hilang sesuai mengikuti unjukrasa di DPRD Sulsel, Kamis (9/4) pekan lalu. Raihnya Maqbul diduga keras diciduk oknum tertentu, terkait aktivitasnya berunjukrasa selama ini.

Maqbul diperkirakan tergeletak di lokasi tertentu dalam perjalanan dari kantor DPRD Sulsel menuju tempat tinggalnya di Kawasan Mahasiswa (Eurete) Kampus Uhas Tamalana. Saat itu Maqbul bermaksud pulang sendiri, tanpa ditemani teman-teman sesama aktivis.

Salah seorang pengunjuk rasa mengungkap sempat melihat Maqbul dituntai pria tak dikenal selama menggelar unjukrasa di DPRD Sulsel, bahkan ketika

Maqbul keluar dari halaman DPRD Sulsel terus disertai pria misterius, bahkan teman sesama pengunjuk rasa.

"Ada kemungkinan dalam perjalanan itu, di sepanjang J. Urip Sumitardja antara Gedung DPRD Sulsel dengan Kampus Uhas, Maqbul diduga atau kemungkinan diseret premis dari atas pete-pete lanjakutan unimik mikrolet - Redi menuju kampus Uhas," jelas rekan Maqbul.

Ketika ditemui di kampus Uhas Sabtu (11/4), rekan rekan Maqbul mengaku jika rekannya yang saat ini memang aktif dalam berbagai kegiatan kampus, termasuk unjukrasa yang selama ini digelar mahasiswa Unhas dengan berbagai kasus faktual.

Tak mengisahkan jilak raihnya Maqbul dikaitkan dengan aktivitasnya selaku demonstran, apalagi Maqbul dikenal cukup keras melewatkan kritik-kritikannya ketika menggelar unjukrasa bersama teman-temannya.

"Sejak pulang dari kantor DPRD Sulsel, kami tak pernah melihatnya lagi. Kamiannya juga masih kosong," ujar salah seorang tetangga rumah Maqbul yang di Kawasan Uhas Tamalana.

Informasi dari pihak keluarga di Bolawa Keb. Wajo, juga mengatakan belum menerima kedatangan Maqbul di rumahnya, —jika memang diduga pulang atau ketidakhadirannya di Ujung Pandang. Bahkan pihak keluarga sendiri telah melapor ke pihak petugas, guna mempertanyakan keberadaan anggota keluarganya itu.

Kami telah menerima informasi dari keluarga Maqbul bahwa raihannya juga tidak melihatnya Maqbul tidak pulang dalam sehari-hari. "Jelas kru 'Identitas' sesuai mengontak keluarga Maqbul di Sengkang, Kabupaten Wajo.

Kecurigaan keluarga berawal telah polangannya Maqbul untuk berliberan di kampung, karena

tidak bisanya Maqbul tidak pulang saat merayakan Idul Adha, atau Idul Fitri. Namun, kecurigaan itu ditepisnya, karena si sama kemungkinan Maqbul sendiri sibuk di Ujung Pandang.

Tapi adanya informasi dari teman-teman Maqbul di Ujung Pandang bahwa ia juga tidak pernah melihat raihannya itu selama tiga hari belakangan ini, membuat pihak keluarga di Wajo merasa cemas.

"Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, jadi kita tunggu sikap kepolisian dalam menangani kasus ini," jelas rekan Maqbul seperti yang diceritakan keluarganya. Sementara pihak 'Identitas' telah membentuk tim pencari fakta. (S/la/s)

Mahasiswa Unhas Bersatu, Desak Turun Jalan

Ujungpandang, (PR). Untuk pertama kalinya sejak enam tahun terakhir ini, sekitar 10 ribu mahasiswa Universitas Hasanuddin bersatu menggelar unjuk rasa lanjutan di Kampus Tamalanrea, Jumat (17/4) kemarin. Mereka berdatangan dari berbagai fakultas melalui koridor kampus mengenakan jaket merah bergabung ke lapangan di depan PKM Unhas.

Pemandangan benar-benar merah oleh jaket alhamdulillah. Di atas podium pun tegak beberapa kumudung warna merah. Para mahasiswa tak peduli lagi dengan panasnya matahari pagi untuk mendengarkan seluruh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan Unhas tampil sebagai pembicara di podium di lantai atas bagian utara gedung PKM Unhas. Mereka tampak mulai tidak sabar mengikuti jalannya aksi hanya diadakan dalam bentuk mimbar bebas.

Mahasiswa dari 13 fakultas di lingkungan Unhas itu mulai berkumpul sekitar pukul 09.00 Wita. Ratusan mahasiswa D-3 yang bermarshas di Kampus Baraya, sekitar pukul 10.00 turun dari Damri dan bergabung dengan teman-temannya yang sudah lebih dahulu berkumpul di lapangan PKM Tamalanrea.

Pers pimpinan lembaga kemahasiswaan menyepakati, hari Jumat kemarin tidak ada kuliah. Bahkan, sejumlah dosen juga ikut hadir dan menyaksikan jalannya mimbar bebas para anak didiknya.

"Memperjuangkan tuntutan reformasi tidak cukup hanya dengan

um mimbar bebas dalam lingkungan kampus, melainkan kita juga perlu turun jalan," desak massa mahasiswa Unhas, yang kemarin memerahkan lapangan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di Kampus Tamalanrea.

Keinginan sebagian besar mahasiswa peserta demo untuk turun jalan tidak kesampaian. Sebab pihak penyelenggara aksi yang terdiri atas para pengurus lembaga kemahasiswaan tidak setuju.

"Perjuangan kita masih panjang, kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul untuk memulai start untuk berlari maraton. Jangan cepat menghabiskan energi," ujar salah seorang pembicara.

Selain PR III Unhas yang diadukan di podium, juga Drs. M. Alwi Rahman yang berbicara singkat. Tapi puncaknya, saat salah seorang mahasiswa putri Unhas tampil di podium. Dia membacakan apa yang mereka sebut sebagai Tuntutan Solidaritas Mahasiswa Unhas. Tuntutan tersebut, menurut mereka, digodak para pimpinan lembaga kemahasiswaan.

kan reformasi membutuhkan banyak energi. Untuk itu kita tidak bisa membuang-buang tenaga lewat aksi satu hari saja. Kita juga tidak mengingkari perjuangan dilakukan dengan kekerasan," demikian para aktivis penyelenggara aksi memberi alasan atas penolakan terhadap desakan mahasiswa turun jalan.

Walaupun demikian, mereka juga tetap melihat aksi turun jalan sebagai salah satu alternatif yang mungkin bisa diterapkan.

"Tapi itu harus dipikirkan secara matang kapan waktunya. Yang jelas, suatu saat kami akan memenuhi keinginan saudara-saudara untuk secara bersama-sama turun jalan," janji salah seorang penyelenggara aksi kemarin.

Sikap penyelenggara aksi yang membandingkan keinginan massa mahasiswa turun jalan membuat sebagian peserta aksi tampak kecewa. Terlebih, setelah aksi yang kemarin berlangsung sekitar tiga jam, sebagian dari mereka tidak langsung pulang ke fakultas masing-masing.

Sekitar 100-an di antara mereka malah mengambil inisiatif sendiri menuju Pintu I Kampus Unhas untuk menggelar aksi. Mereka membentuk mimbar bebas tepat di mulut jalan masuk kampus. Dengan terbit mereka bergantian tampil memimpin aksi. Semuanya menyuarakan tuntutan yang sama.

"Hanya satu kata yang kita butuhkan sekarang yakni reformasi," ungkap seorang mahasiswa yang tampil berbicara di depan teman-temannya dengan

jas merah.

Aksi di pintu masuk kampus ini berlangsung tertib di bawah pengawasan sejumlah personel petugas kepolisian dari Polsek Biringkanaya. Mereka melanjutkan aksinya dengan salat Jumat bersama jama'ah, tepat di depan Pintu I Kampus. Ada yang malah mesagambil tempat salat di sebagian badan jalan raya. Meski begitu, tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Bubarkan Pada aksi unjuk rasa di PKM, mahasiswa Unhas yang tergabung dalam Forum Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas kembali menegaskan perlunya reformasi yang diawali dari pelaksanaan sidang istimewa MPR.

"Jika ternyata MPR tidak mampu melaksanakan sidang istimewa maka MPR harus dibubarkan dan segera membentuk MPRS," demikian pernyataan tertulis yang dibacakan salah seorang mahasiswa pada aksi mimbar bebas di PKM.

Tuntutan lain yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan lima paket undang-undang politik. Meliputi Undang-Undang tentang Parpol dan Golkar, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Susunan Keanggotaan DPR/MPR, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Pemerintahan Desa.

Aksi kemarin merupakan yang terbesar selama beberapa hari terakhir ini. Bahkan menurut keterangan pegawai rektorat, berbagai fakultas dalam jumlah

PKM kemarin merupakan salah satu pertanda bangkitnya kembali keberamaan mahasiswa di perguruan tinggi terbesar di kawasan timur Indonesia tersebut yang selama ini sering diisik oleh miskomunikasi internal yang sering merepotkan pimpinan universitas.

"Saya bangga, mahasiswa Unhas sudah bersatu. Ini merupakan salah satu napas baru gerakan Amran Razak sebagai Pembantu Rektor III Unhas menyatukan mahasiswa Unhas," kata salah seorang mantan aktivis mahasiswa Unhas yang juga menyaksikan aksi mimbar bebas tersebut.

"Kami ikut gembira karena dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu terjadi perselisihan mahasiswa antar fakultas. Sekarang mereka justru kompak untuk tujuan yang sama. Mudah-mudahan kelompok ini terus dipertahankan," ujarnya.

Pembantu Rektor III, Amran Razak, yang setia mengabdikan setiap aksi yang dilaksanakan mahasiswa menyatakan, pihak pimpinan Unhas dapat memahami gerakan yang dilakukan mahasiswa.

"Tu merupakan salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap nasib bangsanya," ujar Amran.

Dia juga minta pihak luar agar bisa ikut memahami gerakan yang dilakukan mahasiswa. Untuk itu dia berharap selalu ada koordinasi dengan pihak pimpinan universitas berkaitan dengan penanganan aksi-aksi mahasiswa.

ekonomi Indonesia karena-

dahulu," jelasnya.

Hanya saja

Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI Agum Gumelar:

ABRI Menghormati Aspirasi yang Berkembang di Masyarakat

Ujung Pandang, (PR). ABRI di daerah Kodam VII/Wrb hususnya di daerah Sulsel isa mengerti tentang aspirasi yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat dan turut menyuarakan aspirasi tersebut untuk mencegah terjadinya sesuatu yang bisa menimbulkan gejala dalam masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Sikap ABRI di wilayah ini menghormati perkembangan aspirasi yang terjadi didalam masyarakat dan tidak mau melakukan tindakan untuk menutup taupun menyumbat penyuluan aspirasi ini. Demikian angdam VII/Wrb Mayjen TNI Agum Gumelar dalam acara simu wartawan yang berlangsung di Ma Kodam VII/Wrb, Jumat pagi (24-4).

Pada acara temu wartawan emarin itu hadir Pangkoopau-II Marsda TNI Suparno Iuanan SE Kapolda Sulsel rigjen Pol Drs Ali Hanafiah, Pangkosekhanudnas-II

Marsma TNI Sony Rizani, Wa. Dan Lantamal-IV Kol Laut Sutyasmo, Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Ampy N. Tanudjwa, para Perwira dari ketiga Angkatan dan Polri dan Kakarwil Dep. Pen dan Ketua PWI Sulsel H. Alwi Hamu.

Lebih jauh dikatakan Pangdam, sikap kedewasaan ABRI di daerah ini didalam mengikuti perkembangan aspirasi yang timbul didalam masyarakat itu hendaknya mau dimengerti dan dihormati. Sikap ABRI yang demikian ini memperhatikan betapa besar perhatian ABRI tentang penting dan berharganya stabilitas keasmanan dan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang perlu dijaga. Oleh karena itu perlu juga ada sikap kedewasaan dari seluruh komponen masyarakat termasuk sikap kedewasaan dari para pelaku penyalur aspirasi. Dikatakan, sikap persuasif yang selama ini diterapkan jajaran ABRI didalam menanggapi unjuk rasa yang terjadi jangan sampai diartikan bahwa ABRI lemah, tetapi hendaknya diketahui kata Panglima, fungsi ABRI adalah menjaga jangan sampai gerakan-gerakan ini melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas. ABRI tetap memberikan toleransi dengan sikap yang lebih persuasif, olehnya sikap yang demikian ini mau dimengerti oleh masyarakat.

Tugas ABRI khususnya Polri saat ini cukup berat, karena selain menanggapi kasus-kasus tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, Polri juga ditugaskan untuk menjaga tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat karena

adanya aksi unjuk rasa. Dalam hubungan dengan beban tugas Polri yang begitu berat dan kompleks itu, Panglima menghimbau lapisan masyarakat untuk bisa memberikan dukungan dan bantuannya kepada Polri didalam melaksanakan tugasnya.

Tolong masyarakat mau membantu kondisi yang sedang dihadapi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harap Panglima. Dikatakan, keprihatinan terjadinya krisis ekonomi dan moneter saat ini bukan saja dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh prajurit ABRI dan keluarganya. Aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat oleh Panglima dinilai sebagai aspirasi yang responsif dan wajar yang menginginkan adanya perbaikan-perbaikan demi untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat saat ini. Aspirasi yang digelar mahasiswa merupakan aspirasi yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.

Sikap ABRI sendiri jelas mendukung langkah-langkah untuk mengatasi kondisi yang sulit ini melalui perbaikan-perbaikan baik yang menyangkut politik ekonomi maupun hukum dan sikap ini telah ditegaskan oleh pimpinan ABRI. Kita semua tidak menginginkan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Panglima, semua usaha yang positif dan mendapat dukungan dan simpati dari semua kalangan akan menjadi nyata dan menimbulkan manfaat bila wujud penyampaian bisa menimbulkan masalah yang lebih besar dan membahayakan masyarakat. Olehnya ka-



- Mei-Juni, puncak demam berdarah. Pak!
+ Kalau boleh, puncak itu kita hapus saja. Bu!

Wartawan Tuntut Palaguna Minta Maaf

* Mahasiswa Masih Menduduki DPRD

Ujung Pandang, (PR). Puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang selama ini bertugaskan pernyataan sikap. Intinya menuntut Gubernur H.Z.B. Palaguna bersama Kepala Biro Humas Pemda Sulsel Andi Baso Mahmud meminta maaf secara terbuka kepada wartawan.

Wartawan menyampaikan tuntutan tersebut karena menganggap Gubernur H.Z.B. Palaguna telah melecehkan profesi wartawan. Itu terjadi ketika Sabtu (30/5), sekitar 40 wartawan media cetak dan elektronik diundang untuk jumpa pers dengan Gubernur Palaguna di Gubernur Ujung Pandang. Namun hingga pukul 03.00 dinihari, Gubernur Palaguna menolak menemui wartawan yang telah menunggu sejak pukul 19.00 Wita. "Selain itu, Gubernur Palaguna tanpa merasa bersalah melalui Kepala Biro Humas Pemda Sulsel Andi Baso Mahmud, memberi penilaian bahwa pemberitaan mengenai aksi mahasiswa Ujung Pandang di media massa tidak berimbang. Juga meminta jangan membesar-besarkan aksi demonstrasi mahasiswa," tulis wartawan dalam pernyataan sikap yang ditujukan ke Gubernur H.Z.B. Palaguna, tembusan Mendagri, Men-

dan Kemnas HAM. Menurut wartawan penandatangan pernyataan sikap, tindakan Gubernur H.Z.B. Palaguna yang melecehkan profesi wartawan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memahaminya jiwa dan semangat reformasi yang kini diperjuangkan hampir semua lapisan masyarakat. "Bahkan tindakan tersebut menimbulkan kesan, Gubernur Sulsel arrogant dan feodal. Untuk itu, selain minta maaf, Gubernur dan Kepala Biro Humas Pemda Sulsel harus berjanji tidak mengulangi tindakan pelecehan profesi wartawan yang tidak mencerminkan interkasi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat yang terbangun selama ini," tulis wartawan dalam pernyataan sikapnya. **Masih Menduduki** Hingga malam tadi ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Ujung Pandang yang tergabung dalam Persatuan



H.Z.B. Palaguna

aksi Mahasiswa Mahasiswa Indonesia (PAMMI) masih menduduki Kantor DPRD Sulsel. Mereka tetap konsisten menyuarakan tuntutan yang mendesak H.Z.B. Palaguna mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Sulsel. Atasannya, H.Z.B. Palaguna paling bertanggungjawab terhadap praktik kolusi, korupsi, nepotisme dan feodalisme (KKNF) di Sulsel. Aksi mahasiswa yang sejak Jumat (29/5) menduduki Gedung DPRD tersebut ternyata mendapat perhatian dari pengguna jalan yang melintang di depan kantor wakil rakyat, khususnya pada malam hari. Mereka terutama tertarik pada aksi mahasiswa yang secara bergantian melakukan orasi dengan topik sentral reformasi serta tuntutan mayor yang ditujukan ke Gubernur Palaguna. Warga yang hadir di sekitar arena aksi sebagai penggembara, juga terikat dengan adegan-lagu dan penuh kritik dari mahasiswa dalam bentuk

pementasan seni, antara lain pembacaan puisi yang menyoroti praktik KKN di daerah ini. Mahasiswa juga melewatkan waktu dengan mendengarkan berbagai jenis musik. Sabtu (30/5) malam, tampak pula beberapa praktisi hukum di daerah ini antara lain, Andi Rudianto Asapa SH, Sarifuddin Suddin SH (Direktur PBH Sulsel), dan Haabi Abdullah SH (LBH Ujung Pandang) hadir di tengah-tengah mahasiswa. Andi Rudianto Asapa malam semput didaulat oleh mahasiswa membawakan orasi. Rudiyanto lantas menyampaikan pidato singkat. Antra lain menyatakan, apa yang diperjuangkan mahasiswa sangat logis. Masyarakat sudah bosan hidup dalam kungkungan kamafiasse dari penguasa yang cenderung membahangi rakyat. Soal bergesernya tuntutan dari skop nasional ke skop lokal, mantan Direktur LBH Ujung Pandang ini mengatakan, itu merupakan indikasi adanya komitmen dari para mahasiswa untuk melakukan reformasi secara total guna membersihkan republik dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk membenarkan praktik KKN yang sudah lama menggerogoti negeri ini. (tim).

Terbukti Salah Syariat, Palaguna Mundur Saja

Ujung Pandang, (PR). Dalam dogma agama mana pun, kolusi, korupsi, nepotisme dan feodalisme tidak pernah ditelerir. Makanya, jika H.Z.B. Palaguna terbukti menyalahi syariat, —sesuai data dan buyan fitnah, atau mengingkari sumpahnya sebagai pemimpin rakyat di daerah ini, sebaiknya memang ia mundur saja dari jabatannya sebagai gubernur Sulsel. "Kalau mau aman cepat dan itu berdasarkan nilai-nilai budaya orang timur, budaya siri", ada baiknya Palaguna mundur saja," tegas Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Drs. KH. Naziruddin Rasak. Tapi perlu diingat bahwa desakan mundur itu, betul-betul didasarkan fakta atas kesalahan diri Palaguna, bukan karena unsur fitnah. Seperti isu yang digelindingkan mahasiswa selama ini bahwa desakan mundurnya Palaguna dari jabatannya, karena terkait dengan KKNF, seperti adanya dugaan gubernur Sulsel itu terkait dengan proses pengadaan tender di daerah ini. Bahkan sejumlah kebijakan gubernur akhirnya membawa masalah-masalah yang merugikan masyarakat, seperti mobil dinas Pajero setiap bupati/walikota, kebijakan tarif angkut yang membawa tragedi AMARAH, proyek besar GMTDC yang hingga kini masih bermasalah dan sejumlah

kasus-kasus pengusuran atas masyarakat kecil. Menurutnya, desakan mundur rakyat Sulsel yang diuraikan lewat mahasiswa tidak berdasarkan balas dendam, frustrasi, iri hati, bahkan perjuangan reformasi, —termasuk membersihkan pejabat-pejabat, tak justru monim-bulkan ajang budaya fitnah. "Meaki begitu, mahasiswa yang melakukan pengusutan kekayaan pejabat, menyolodki kelakuan kemungkinan tindakan amoral para pejabat, agar tidak menggunakan data kuintitas, bukan jumlah, karena dapat berdampak balik dan susah dibuktikan," lanjutnya.

Menyinggung solusi moderat atas kemungkinan mundurnya H.Z.B. Palaguna, tambah Naziruddin memang perlu melakukan tobat, karena dinilai mahasiswa melakukan kesalahan, penyelewengan jabatan yang membuat masyarakat Sulsel makin terpinggir dan terpuruk. "Konsep tobat ini ada dua, yakni diartikan sebagai bahlub minallah (hubungan dengan Allah) dan itu urusan invididu dengan sang khaliknya. Tapi bahlub minannas (hubungan antar manusia), musti melalui prosedur hukum yang berlaku," tegasnya. Jadi agama jangan hanya di-

pandang sebagai tauhid semata, —dengan alasan apabila Palaguna sudah bertobat maka tak perlu mundur dari jabatannya. Tapi, juga agama itu persoalan syariat, hukum olehnya siapa saja yang dinilai menyelewengkan jabatan, maka harus dikenakan sanksi pidana, atau hukum sesuai dengan kesalahan jabatannya tak terkecuali Palaguna. "Kita tidak pernah kompromi terhadap pelanggaran hukum, penyelewengan jabatan, makanya jika Palaguna terbukti bersalah, sebaiknya harus rela mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Naziruddin. (sl/la/s).

Orbit Telah Memerlihatkan Perannya

Ujung Pandang, (PR). Kehadiran Orbit di Sulsel telah memberikan kontribusi yang besar bagi upaya peningkatan prestasi belajar bagi siswa, khususnya dalam kapasitasnya sebagai wadah yang menyediakan beasiswa. Hal tersebut dikatakan Wagub Bidang I, Dharmadi CH ketika membuka Rakerda Orbit Pertama Tahun 1998 di Baruga Sangiasseri Ujung Pandang. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pengurus Pusat YAAB Orbit yang diwakili Ny. Farida Tanri Abeng, Ketua ICMI Sulsel dan para pengurus daerah Orbit Sulsel. Diambil dari dalam khandai

Kalau sampai pendidikan mereka terputus, jelas sukar untuk mendapat SDM yang potensial di masa mendatang. Sementara Ny. Farida Tanri Abeng atas nama pengurus pusat Yayasan Abadi Orbit mengatakan, yayasan ini sebagai wadah sosial berangkat dari satu konsep yaitu, memberikan bantuan kepada para siswa dalam bentuk beasiswa. Hal itu sejalan dengan sasaran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Khusus pendirian Orbit di Sulsel, telah memperlihatkan aktivitas antara lain, kegiatan pesantren kilat ternadu. (Pluto) di Palopo, pelati-

erasi muda dalam membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan menghadapi persaingan global di masa mendatang. Sementara Ketua ICMI Sulsel Prof. DR. H. Basri Hasanuddin mengatakan, Orbit juga sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kualitas umat. Untuk itu, kehadiran Orbit harus betul-betul berfungsi optimal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Rakerda Orbit berlangsung dua hari dengan menampilkas pemateri antara lain, Dr. Marwah Daud Ibrahim, Ny. Farida

Aksi Mahasiswa Meluas Korban Terus Berjatuh

Jakarta, Kompas

Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. Namun korban di pihak mahasiswa melonjak dibandingkan aksi-aksi sebelum ini, akibat terjanah peluru karet, lemparan batu, dan pukulan. Bentrokan terparah terjadi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Jayabaya dan Gunadarma Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di Unsoed Purwokerto, 63 mahasiswa luka-luka dan menurut Pembantu Rektor III Unsoed, Kusnari SH M Hum, 28 orang di antaranya terpaksa dirawat di rumah sakit (RS). Mereka yang dirawat itu, kebanyakan luka-luka di kepala akibat terkena peltungan dan peluru karet. Delapan mahasiswa di antaranya luka berat, yakni patah kaki, tangan dan seorang patah tulang pinggulnya. Poda gabungan mahasiswa menentang sembilan mahasiswa belum diketahui keberadaannya.

Bentrokan terjadi ketika para mahasiswa berupaya berjalan kaki dengan damai ke gedung DPRD dan berusaha membuka barikade pasukan pengendali massa. Sambil mengayunkan pertungannya, aparat keamanan terus mengejar para mahasiswa yang mencoba memberikan perlawanan. Selain dengan pentungan, untuk membebaskan mahasiswa petugas keamanan menggunakan gas air mata. Rektor Unsoed Prof Rujijanto Misnan, menyatakan inden tersebut.

Di Solo, bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan diwarnai dengan lemparan batu dan bom molotov yang mengakibatkan korban jatuh di kedua pihak. Sebanyak 11 mahasiswa mengalami luka-luka, dua di antaranya dirawat di RS Yarsi, sedang di pihak aparat dilaporkan 43 luka-luka, dua di antaranya dirawat di RS.

Bentrokan meletus ketika sekitar 1.000 mahasiswa bergerak ke luar kampus. Mereka menduduki ke arah petugas Dalmas (pengendali massa), namun petugas memaksa mahasiswa mundur. Saat itulah terjadi lemparan batu dan bom molotov. Sebuah bom molotov yang sempat terpegang seorang mahasiswa, Ferry, mendadak meledak waktu hendak dilemparkan, dan mengakibatkan luka bakar pada tubuhnya. Ferry kemudian dilarikan ke RS "Arya, dekat UMS.

Untuk membebaskan aksi itu petugas melontarkan gas air

mata ke arah massa. Akibatnya 13 mahasiswa jatuh akibat sesak napas, dan sekitar 40 lainnya mengalami pelih mata. Para pengunjuk rasa mendesak menuju ke jalan raya Achmad Yani dan menduduki bahu jalan. Aksi bubat sekitar 13.30 WIB.

Di Riau, bentrokan mahasiswa dan aparat menyebabkan 10 mahasiswa luka-luka dan satu orang dilarikan ke RS, sedangkan aparat keamanan yang luka satu orang. Beberapa kaca mobil juga pecah berantakan. Selain itu enam mahasiswa sempat ditahan, namun kemudian dipaparkan atas desakan sekitar 3.000 mahasiswa yang turun ke jalan. Aksi tersebut merupakan unjuk rasa terbesar dan terlama mahasiswa Riau dalam 10 tahun terakhir. Ketika bergerak menuju Kantor Gubernur, petugas langsung memblokir. Dua tempat pemblokiran dapat ditembus mahasiswa. Namun menjelang 20 meter dari Kantor Gubernur Riau, ratusan petugas kembali menghadang mereka.

Dalam suasana saling dorong mendorong, petugas melepaskan tiga ekor anjing yang membuat mahasiswa kucar-kacir. Petugas menembakkan gas air mata serta memburu mahasiswa dengan rotan.

Di Jakarta

Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanang, yang mengakibatkan sedikitnya 21 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Iby, Cimanang. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat peltungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.

Dua butir peluru karet juga telah berhasil dikeluarkan dari seorang korban. Untuk menenangkan situasi, Dekan Fakultas Teknik Jayabaya Ir Suyarto mengemukakan bahwa tidak ada perlawanan untuk hari Jumat. Bentrokan serupa juga

terjadi di kampus Universitas Gunadarma, Kelapa Dua, ketika ratusan mahasiswa gabungan dari beberapa perguruan tinggi di Depok menggelar aksi mimbar bebas di Jalan Kelapa Dua. Bentrokan terjadi ketika mahasiswa dari kampus Jayabaya ingin berjalan kaki ke Kampus Gunadarma yang jaraknya sekitar empat kilometer, dan dihadang aparat keamanan. Berkaitan dengan peristiwa ini, YLRH menerima laporan bahwa sedikitnya 52 mahasiswa luka-luka.

Mahasiswa Universitas Bahid kembali menggelar aksi keprihatinan mereka. Aksi itu dimulai ketika puluhan mahasiswa Sahid berjalan sambil membawa poster dari simpang Pancoran yang tertetak sekitar 500 meter sebelah selatan kampus mereka. Aparat keamanan mengawal iring-iringan tersebut memasuki kampus. Di dalam kampus telah menunggu rekaman untuk melakukan nomor bebas.

Sedangkan ratusan mahasiswa AMI, ASMI, dan STIE Kampus Ungu yang semula menggelar aksi unjuk rasa di dalam kampus, akhirnya turun ke jalan raya Perintis Kemerdekaan, persis di depan kampus. Aksi yang berlangsung hampir sekitar 1,5 jam itu membuat lalu lintas di jalan tersebut ditutup terutama dari arah Pulogadung ke Cempala Putih.

Tujuh hilang di Yogyakarta

Menyusul bentrokan berdarah yang terjadi di Yogyakarta sepanjang Selasa dan Rabu kemarin, Kapolda DI Yogyakarta (DIY) Kol (Pol) Drs Bani Siswono mengeluarkan surat baru yaitu membatasi demonstrasi mahasiswa di seluruh wilayah DIY hanya sampai pukul 14.00 siang. Lewat waktu itu, aksi akan dibubarkan petugas tanpa negosiasi dengan penangan bertingkat dari semburan air gas air mata, penguncian peluru karet, dan jika perlu peluru tajam.

Kapolda menegaskan ketentuan baru pembatasan waktu demo di hadapan empat orang anggota Tim Advokasi Senat Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta yang datang ke Kantor Majelis DIY dalam rangka klarifikasi hilangnya sejumlah orang dalam insiden hari Selasa hingga Rabu tubuh di Yogyakarta. Tim Advokat antara lain diantar Rektor USD Dr Sastraprasta.

Hingga kemarin ada tujuh

orang dengan identitas jelas tetap belum diketahui rimbanya, setelah aparat keamanan melakukan aksi pembersihan (sweeping) di kampus IKIP Yogyakarta dan sekitarnya antara pukul 23.00 hingga 02.00 WIB dimahari, yaitu Anggoro (UII), Roro Tarigan (Fisipol UGM), Andi Prasetyo (penduduk Wirobrajan), M Operasi (ISB), Muhammad Makruf (Filsafat UGM), Syahrul (penduduk Mrican), serta Asmin (penduduk Mrican).

Di Kampus Universitas Udayana (Unud) Denpasar, masyarakat mulai ikut berunjuk rasa bersama puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Bali. Aksi bertambah meriah karena hadirnya paranormal Permedi dan anggota F-KP DPRD Kodya Denpasar, Kusuma Wardana. Sejak pagi mahasiswa datang secara bergelombang dengan berjalan kaki dari kampus masing-masing. Pasukan Dalam berjaga-jaga di sekitar 400 meter dari kampus.

Di kota Ujungpandang, aksi mahasiswa tetap bergulir dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi. Dalam waktu yang hampir bersamaan ribuan mahasiswa menumpang sepeda motor dan puluhan kendaraan bak terbuka melakukan konvoi ke arah Lapangan Kartini, tetapi kemudian berbalik lagi karena mereka tidak diizinkan oleh aparat keamanan. Akhirnya mereka berpeleceh ke segala arah dan melakukan konvoi keliling kota.

Tiga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Pasia Ujungpandang tertembak dalam aksi unjuk rasa sore hari ini. Mereka masing-masing Elias Parang (23), mahasiswa Fakultas Teknik, Iwan (21) dan Patra Palendik (22), keduanya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Elias masih terbaring di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Akademis Ujungpandang untuk menjalani operasi, sedang kedua korban lainnya sudah kembali ke rumahnya. Bentrokan terjadi ketika aparat berupaya membebaskan aksi mahasiswa yang masih berlanjut hingga pukul 18.00.

Di Banda Aceh, aksi ribuan mahasiswa untuk berjalan kaki dari kampus ke gedung DPRD (sekitar 7 km) berjalan tidak lancar karena "terpecah" oleh hadapan pihak keamanan. Aparat berjaga-jaga di sejumlah persimpangan jalan untuk mencegah mereka ke DPRD atau masuk kota. Namun sebagian mahasiswa

yang "tolos" dari hadapan.

Diserang

Di Jember, aksi keprihatinan mahasiswa di sekitar kampus Tegaboto Universitas Jember (Unj) mendapat serangan dari sekelompok orang tak dikenal. Puluhan orang-orang tak dikenal yang mengendarai empat pick-up langsung melakukan perampasan dan mengacungkan senjata tajam kepada barisan mahasiswa yang menggelar aksi demo.

Akibat peristiwa itu, empat mahasiswa menderita luka, seorang mahasiswa ditabrak sepeda motor, seorang terkena pukulan, dan seorang lainnya luka kena celurit.

Di Palembang, sekitar 300 mahasiswa menilik menggunakan bus yang disediakan aparat keamanan dan memilih berjalan kaki ke Kantor Gubernur dan DPRD. Aksi itu sempat membuat toko-toko di sepanjang Jl Sudirman tutup. Di halaman Kantor Gubernur, jumlah mahasiswa berkembang menjadi sekitar 1.300 orang dan mereka berhasil berdialog langsung dengan Gubernur Sumel Ramli Hassan Bari.

Intel ketahuan

Suana panas memeras unjuk rasa mahasiswa di kampus IKIP Jakarta, ketika mereka "menangkap" seorang yang mereka duga intel TR (48) yang sedang memonitor kegiatan mahasiswa IKIP sekitar pukul 12.30. Dari tanpanya diturunkan dua lembar kartu tanda mahasiswa (KTM) IED, satu alat namanya dan satu lagi masih kosong, satu pistol, alat perkenan, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Setelah menjalani pemeriksaan di ruang restoral, TR akhirnya diserahkan ke POM ABRI oleh mahasiswa. Sebelum dibawa ke POM ABRI, TR sempat diminta memberikan keterangan di hadapan ribuan mahasiswa yang melakukan mimbar bebas.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Mayjen (Pol) Hamami Nala, di Markas Polda Metro kepada wartawan mengatakannya, aksi mempartisipasi jabatannya demi keamanan Ibu Kota. "Saya tidak ingin Jakarta seperti Medan," tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Hamami juga menyayangkan sikap Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dianggapnya mengumpulakan masukan hanya dari pihak mahasiswa.

(Tim Kompas)

B. DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Akbar Endra
Pendidikan : Sastra Daerah Unhas 1992
Domisili : Maros
Pekerjaan : Politikus dan Jurnalis
Koordinator Kedua AMPD.

2. Nama : Andi Aisyah Lamboge
Pendidikan : Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin 1996
Domisili : Jakarta
Pekerjaan : Jurnalis

Salah satu penyusun buku 98-99: *Catatan Kemahasiswaan Seorang Pembantu Rektor karya Amran Razak* (Pembantu Rektor III Unhas 1998)

3. Nama : Aryanto Karma Wisesa
Pendidikan : Kelautan Universitas Hasanuddin 1994
Domisili : Jakarta
Pekerjaan : Wiraswasta

Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Unhas 98 & Ketua Senat Mahasiswa Kelautan 1997-1998.

4. Nama : Dahlan Usman, S. E.
Pendidikan : Manajemen-FE Universitas Hasanuddin 1993
Domisili : Gorontalo
Pekerjaan : Agrikultura

Koordinator tim aksi medan Solidaritas Mahasiswa Unhas 98.

5. Nama : Hambali
Pendidikan : Perikanan Unhas 1996
Domisili : Makassar
Pekerjaan : Konsultan Politik
Korlap Aksi Mahasiswa Unhas 1998.
6. Nama : Hasbi Lodang, S. S.
Pendidikan : Sastra Asia Barat Unhas 1993
Domisili : Makassar
Pekerjaan : Komisaris Pelindo Daya Sejahtera
Koordinator Ketiga AMPD dan aktivis pers UKPM Unhas.
7. Nama : Makbul Halim, S. Sos.
Pendidikan : Ilmu Komunikasi Unhas 1992
Domisili : Makassar
Pekerjaan : Komisaris PT. GMTD (Tanjung Bunga)
Aktivis pers Identitas Unhas dan merupakan sosok yang dikabarkan diculik pada bulan April 1998.
8. Nama : Ostaf Al Mustafa, S.Sos.
Pendidikan : Ilmu Komunikasi Unhas 1988
Domisili : Kabupaten Bogor
Pekerjaan : Penulis lepas
Humas AMPD & Aktivis HMI Ujung Pandang.

C. LIST PERTANYAAN

1. Pertanyaan Umum (pertanyaan yang dilontarkan kepada setiap informan):
 - Bagaimana proses terjadi dan terbentuknya gerakan reformasi di Ujung Pandang?
 - Bagaimana pola persebaran gerakan reformasi di Ujung Pandang? Apakah hanya berbasis di kampus-kampus?
 - Apakah ada aspirasi lokal dari gerakan reformasi di Ujung Pandang?
 - Bagaimana identifikasi gerakan reformasi dalam lingkup Unhas?
 - Bagaimana militer (dalam kaca mata sipil) mengambil tindakan dalam gejolak reformasi 1998 di Ujung Pandang?
 - Siapa saja tokoh militer yang membangun hubungan dengan mahasiswa dalam gerakan reformasi 1998?
 - Apa yang membedakan antara pendekatan militer di Ujung Pandang dengan kota-kota lainnya di Indonesia, misalnya Jakarta, Yogyakarta, dan sebagainya?

2. Pertanyaan Khusus (pertanyaan yang dilontarkan kepada informan-informan tertentu):
 - Bagaimana Kelompok atau forum diskusi menjadi wadah kritis mahasiswa Unhas? Siapa saja kelompok diskusi tersebut?
 - Bagaimana dinamika kemahasiswaan di Unhas merespon situasi nasional saat sebelum reformasi, melalui kejadian-kejadian nasional seperti pembredelan Tempo, Amarah UMI 1996, Kudatuli 1996, Pemilu 1997, dan sebagainya?
 - Apakah gerakan reformasi mahasiswa Unhas berpusat atau bernaung di bawah Aksi Solid Unhas?
 - Sejak kapan Aksi SOLID Mahasiswa Unhas muncul? Siapa pendiri dan tokoh-tokohnya? Serta apa saja yang diperjuangkan oleh Aksi SOLID Unhas?
 - Bagaimana hubungan antara AMPD dengan militer di Ujung Pandang?
 - Bagaimana peran organisasi pers semacam UKPM dalam gerakan mahasiswa Unhas saat reformasi 1998?

D. BIODATA PENULIS



Herry Andrii Kiswanto lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2000. Penulis merupakan anak laki-laki dari pasangan Ramli Syahrani dan Hj. Reni Tajuddin. Riwayat pendidikan penulis yaitu menamatkan pendidikan SD pada tahun 2012 di SDN 5 Kota Parepare, tahun 2015 menamatkan pendidikan SMP di SMP 10 Parepare, dan tahun 2018 menamatkan pendidikan SMA di SMAN 2 Parepare. Setahun berselang tepatnya tahun 2019 penulis menjadi mahasiswa di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Karya ilmiah yang berwujud skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang mulai direncanakan dan dipikirkan sejak akhir tahun 2022, kemudian mulai dikerjakan sepanjang tahun 2023. Skripsi ini berjudul “Militer dan Gerakan Reformasi di Ujung Pandang (1996-1999).”



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 699/UN4.9/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMUSEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca** : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 3140/UN4.8.7/TD.06/2022 tanggal 16 Mei 2023 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
 8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
 9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 – 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
 11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A.
NIP : 197410162003121001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Andi Lili Evita, S.S.,M.Hum
NIP : 199001112019032017
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/Gol. III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Herry Andrii Kiswanto
NIM : F061191044
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Militer dan Gerakan Reformasi di Ujung Pandang (1996-1999)

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Mei 2023



Dr. Murti Adi Armin, M.Hum. u
NIP 196803231993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1565/UN4.9.1/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca** Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 9040/UN4.8.7/PK.03.00/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.
- Menimbang**
- a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
 8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
 9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
 11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

KESATU Menunjuk dan menugaskan kepada

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1	Dr Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Ketua	Penata Tk.I, Gol. III/d
2	Andi Lili Evita, S.S.,M.Hum 199001112019032017	Sekretaris	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
3	Dr Ilham, S.S.,M.Hum. 197608272008011011	Penguji I	Penata, Gol. III/c
4	Nasihin, M.A. 198204032022043001	Penguji II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
5	Dr Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Pembimbing I	Penata Tk.I, Gol. III/d
6	Andi Lili Evita, S.S.,M.Hum 199001112019032017	Pembimbing II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi

Nama Herry Andrii Kiswanto
 NIM F061191044
 Departemen Ilmu Sejarah
 Topik/Judul Militer dan Gerakan Reformasi di Ujung Pandang (1996-1999)

KEDUA Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 04 Desember 2023



Ditandatangani oleh Kepala Bidang Akademik dan Kesiswaan,

Dr. Margi Adi Armin, M.Hum.
NIP. 196803231993031002

Tembusan:

- 1 Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
- 2 Para Wakil Dekan FIB;
- 3 Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
- 4 Kepala Bagian Tata Usaha;
- 5 Kepala Subbagian Pendidikan;
- 6 Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN

Makassar, 9 Desember 2022

Nomor : B/3046/XII/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin penelitian

Kepada

Yth. Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan
Universitas Hasanuddin

di

Makassar

1 Dasar:

a. Surat Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Nomor 9999/UN4 9 1/PT.01.04/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Permohonan izin penelitian; dan

b. Pertimbangan Komando dan Staf Umum Kodam XIV/Hsn.

2. Sehubungan dasar di atas, pada prinsipnya Pangdam XIV/Hsn menyetujui permohonan izin penelitian di Kodam XIV/Hsn bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin a.n. Herry Andrii Kiswanto NIM F061191044 dengan judul penelitian "Peranan Militer dalam Sejarah Reformasi di Ujung Pandang pada tahun 1994 s.d. 1998".

3. Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan:

- 1 Pangdam XIV/Hsn
- 2 Kasdam XIV/Hsn
- 3 Irdam XIV/Hsn
- 4 Asrendam XIV/Hsn
- 5 Para Asisten Kasdam XIV/Hsn
- 6 Kabintaljarahdam XIV/Hsn

Alim Mimbarno, S.A.P
Kolonel Inf NRP 11970037570875



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

Nomor 338/UN4 9 1/PT 01 04/2023
Perihal Permohonan Izin Penelitian

17 Januari 2023

Yth. Pimpinan Kantor Harian Fajar Makassar

Dengan hormat, berdasarkan surat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin No. 312/UN4.8.7/PT.01 00/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberi izin terhadap mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk melaksanakan penelitian guna penyelesaian penulisan Skripsi Program Strata Satu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1	F061191044	Herry Andrii Kiswanto	Peranan Militer dalam Gerakan Reformasi di Ujung Pandang (1994-1998)

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kemahasiswaan,

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
NIP. 196806231993031002

Tembusan

1. Dekan FIB Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas
3. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas.





JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG (1996-1999)

NOMOR : 699/UN4.9/KEP/2023

TANGGAL SK : 17 Mei 2023

PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I : Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D

PEMBIMBING II : A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

MAHASISWA BIMBINGAN

NAMA : Herry Andrii Kiswanto

NIM : F061191044

No.	Hari/tanggal	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1	Selasa/23 Mei 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Menyusun kronologi peristiwa besar di Makassar dalam rentang periode penelitian, lengkap dengan sumber primernya.
2	Jumat/9 Juni 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Menyusun struktur bab.
3	Selasa/1 Agustus 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Revisi bab II. Dilengkapi dengan nama-nama mahasiswa sebagai pelaku sejarah beserta organisasinya.
4	Selasa/29 Agustus 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Revisi bab II menyangkut gaya bahasa. Selain itu lanjut susun bab III dan IV.
5	Senin/11 September 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Revisi Bab III dan IV.
6	Senin/18 September 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Menyusun bab V.
7	Rabu/20 September 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D		Diskusi penelitian seluruhnya.



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG (1996-1999)
NOMOR : 699/UN4.9/KEP/2023
TANGGAL SK : 17 Mei 2023
PEMBIMBING SKRIPSI
PEMBIMBING I : Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D
PEMBIMBING II : A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

MAHASISWA BIMBINGAN
NAMA : Herry Andrii Kiswanto
NIM : F061191044

No	Hari/Tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan	Respon Mahasiswa
1.	Selasa/1 Agustus 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D A. Lili Evita, S.S., M.Hum		Diskusi mengenai kerangka bab.	Menyusun kerangka bab sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan membaca
2.	Kamis/21 September 2023	Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D A. Lili Evita, S.S., M.Hum		Perbaiki rumusan, tambahkan pertanyaan penelitian, dan dampak pergerakannya.	Merevisi rumusan masalah dan menambahkan pertanyaan penelitian
3.	Jumat, 24/9/23	A. Lili Evita - S.S., M.Hum		- susun kalimat berdasarkan SPOR - Belum diperbaiki sistematika di Bab 1 - Belum nampak guna Penelitian	- susun kalimat berdasarkan SPOR - Belum diperbaiki sistematika di bab 1 - Belum nampak guna & manfaat T.A.
4.	Kamis, 5/10/23	A. Lili Evita .S.S., M.Hum		- Gunakan mapping untuk memperjelas - kata hubung yang berada di depan - Perbaiki kembali SPOR	
5	Selasa, 17/10/23	A. Lili Evita, S.S., M.Hum		- Abstrak ditambahkan - visualisasi ditambahkan - istilah - istilah perlu dijelaskan	
6	Selasa, 27/10/23	A. Lili Evita, S.S., M.Hum		- Perbaiki abstrak dan kesimpulan - Lengkapi lembar awal - perbaiki urutan lampiran	



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG (1996-1999)
NOMOR : 699/UN4.9/KEP/2023
TANGGAL SK : 17 Mei 2023
PEMBIMBING SKRIPSI :
PEMBIMBING I : Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D
PEMBIMBING II : A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

MAHASISWA BIMBINGAN
NAMA : Herry Andrii Kiswanto
NIM : F061191044

No	Hari/Tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan	Respon Mahasiswa
7	Sabtu, 3/10/23	A. Lili Evita, S.S., M.Hum		<ul style="list-style-type: none">- Beri catatan pengantar pada setiap bab- Lengkapi dokumen pengantar- Perbaiki kata pengantar- Riset video untuk presentasi sidang	
8	Sabtu, 20/10/23	A. Lili Evita		<ul style="list-style-type: none">- kcc	